

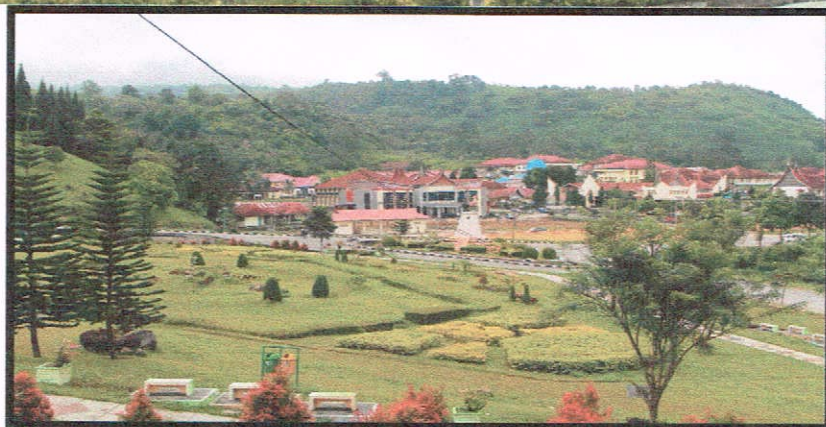


PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten solok di Arosuka

Http/www.bappeda.kabsolok.go.id Telp./Fax (0755) 31161
Email : bappedakabsolok@gmail.com website : www.bappeda-kabsolok.com

BAHAN PENYUSUNAN
LPPD DAN LKPJ TAHUN 2016



Barenlitbang Kabupaten Solok

Tahun 2017

www.bappeda-kabsolok.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah dan informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

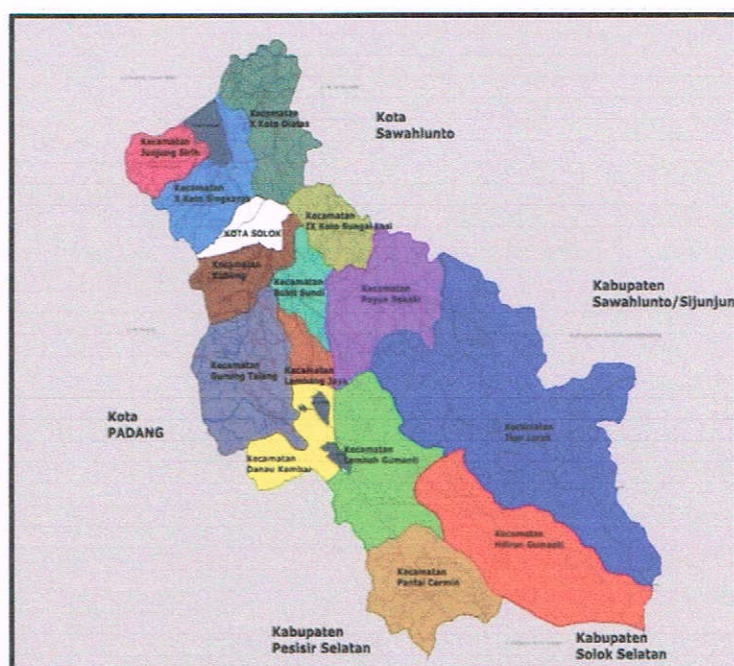
1. Aspek Geografi

1.1. Geografi

Kabupaten Solok memiliki luas wilayah sebesar 373.800 Ha (3.738 Km²) dan secara astronomis Kabupaten Solok terletak diantara 00° 32' 14" - 01° 46' 46' 45" Lintang Selatan dan antara 100° 25' 00" – 101° 41' 00" Bujur Timur. Jika dilihat dari batas wilayah, Kabupaten Solok memiliki batasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan

Gambar 1. Peta Kabupaten Solok



Sumber : RTRW Kabupaten Solok Tahun 2013

Secara administratif Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 414 Jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki 2 nagari. Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto Diatas dengan jumlah 52 jorong dan kecamatan yang memiliki jorong paling sedikit adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Junjung Sirih dengan jumlah masing-masing 11 jorong sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Luas Wilayah Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas Wilayah (Ha)
1	Pantai Cermin	S u r i a n	2	28	36.600
2	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	45.972
3	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	26.328
4	Payung Sekaki	Sirukam	3	11	36.450
5	Tigo Lurah	Batu Bajaranjang	5	20	60.250
6	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43	9.990
7	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	7.010
8	Gunung Talang	Talang	8	40	38.500
9	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	10.900
10	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	17.100
11	Kubung	Koto Baru	8	37	19.200
12	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	25.700
13	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	29.550
14	Junjung Sirih	Paninggahan	2	11	10.250
Jumlah			74	414	373.800

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tigo Lurah dengan luas 60.250 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.010 Ha.

Secara geografis Kabupaten Solok memiliki posisi yang sangat strategis, selain terletak dijalur Lintas Sumatera juga berbatasan langsung dengan Kota Padang yang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Barat. Setelah Pusat Pemerintahan dan ibukota Kabupaten Solok dialihkan ke Arosuka pada Tahun 2004, jarak tempuh dari ibukota ke Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Kota Padang) menjadi semakin pendek dari 64 Km menjadi 40 Km. Untuk Jarak antar Propinsi, Jarak Kabupaten Solok ke Kota Medan adalah (825 Km), ke Banda Aceh 1.433 Km, ke Pekanbaru 231 Km, ke Jambi 495 Km, ke Palembang via Muara Enim 993 Km, ke Bengkulu via Muaro Bungo 736 Km dan ke Bandar Lampung 1.170 Km.

1.2. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Solok sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit mulai dari dataran tinggi di bagian Selatan hingga dataran yang relatif rendah di bagian Utara dengan ketinggian berkisar antara 329 m hingga 1.458 m di atas permukaan laut.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Solok ini dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu :

- 1) Ketinggian antara 100 - 500 m di atas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X Koto Singkarak, Junjung Sirih, IX Koto Sungai Lasi, Kubung, dan Bukit Sundi.
- 2) Ketinggian antara 500 - 1.000 m di atas permukaan laut, tersebar dibagian utara, yaitu Kecamatan Tigo Lurah, Gunung Talang, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Payung Sekaki.
- 3) Ketinggian 1.000 - 1.500 m di atas permukaan laut, tersebar di Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, Lembang Jaya dan Kecamatan Danau Kembar.

Kabupaten Solok memiliki rata-rata hari hujan selama 15 hari/bulan dengan rata-rata curah hujan 169,515 mm/tahun. Selain itu, Kabupaten Solok memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar diantaranya, mempunyai 1 buah Gunung, yaitu Gunung Talang yang berada di Kecamatan Gunung Talang dan 4 buah danau yaitu Danau Singkarak yang terletak di Kecamatan X Koto Singkarak, Danau Diateh, Danau Dibawah yang berada di Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti, serta Danau Talang yang berada di Kecamatan Gunung Talang.

1.3 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Peta Geologi skala 1 : 250.000 lembar Solok (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1995) Strata Batuan Penyusun Kabupaten Solok adalah :

- 1) Endapan Permukaan (Qal dan Qf)
- 2) Endapan Gunung Api Muda (Qyu, Qatg)
- 3) Endapan Gunung Api Tua (Qtau, Qou, Qol)
- 4) Endapan Sedimen (Tmo, Pbl)
- 5) Batuan Metamorfosis (Pb, PCkq, PCks, Rts)
- 6) Batuan Terobosan (Kgr, gd,g)

Sedangkan struktur geologi yang berkembang adalah :

- 1) Struktur patahan aktif adalah struktur yang paling dominan dengan Arah jalur struktur patahan ini berarah barat laut - tenggara. Mulai dari Danau Atas, Danau Bawah menerus ke arah Barat Laut ke Danau Singkarak. Struktur ini termasuk dalam jalur patahan besar Sumatera yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi konvergen antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Benua Asia. Pergerakan struktur patahan aktif menghasilkan juga dataran antar perbukitan (graben) di sekitar Solok.
- 2) Patahan-patahan yang terbentuk sebagai akibat pergerakan patahan utama Sumatera, dengan sebaran hampir merata khususnya di wilayah bagian Selatan. Mulai dari Danau Dibawah ke arah Selatan meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Tigo Lurah. Sedangkan wilayah dengan sebaran patahan kecil meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kubung, X Koto Singkarak, Kec. IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan Payung Sekaki.
- 3) Kekar/rekahan berkembang pada batuan dan untuk batuan malihan dan terobosan berkembang struktur kekar/rekahan di Kecamatan Tigo Lurah dan sekitarnya.

1.4 Hidrologi.

Hidrologi merupakan kondisi tata air yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan (faktor internal) dan kondisi tutupan lahan (kondisi internal). Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Solok dapat dikatakan sangat baik. Dengan pola aliran pada umumnya adalah bersifat *dendritik* dengan banyak dijumpainya sumber air baik yang berupa air permukaan maupun mata air dan air tanah sebagaimana penjelasan berikut :

a. Air Permukaan

Keadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan materi penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air mengalir melalui sungai-sungai kecil dengan membentuk pola aliran yang berbentuk dendritik dan karena sifat hujan arografisnya yang tinggi memungkinkan kondisi sungai untuk mengalir sepanjang tahun. Sebagian besar wilayah Kabupaten Solok merupakan bagian dari dua

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir kearah timur yaitu DAS Agam Kuantan - Indragiri dan DAS Batang Hari.

Kabupaten Solok mempunyai 26 buah sungai yang berada hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Solok. Sungai terpendek sepanjang 1,8 Km adalah Batang Sawah Tengah di Nagari Bukit Bais, sedangkan Sungai terpanjang mencapai 81,75 Km adalah Batang Gumanti yang mengalir di Nagari-nagari di Kecamatan Lembah Gumanti dan Hiliran Gumanti. Seluruh sungai di Kabupaten Solok memiliki debit antara 0,1 - 150 m³/dtk. Selanjutnya Kabupaten Solok juga mempunyai danau yang terdiri dari:

- 1) Danau Diatas berada di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar;
- 2) Danau Dibawah berada di Kecamatan Danau Kembar;
- 3) Danau Talang berada di Kecamatan Danau Kembar,
- 4) Danau Singkarak berada di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih, danau ini juga terdapat pada wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2
Jumlah Danau Di Kabupaten Solok

No	Nama Danau	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km ²)
1	Danau Diatas	Lembah Gumanti, Danau Kembar	6,25	2,75	17,20
2	Danau Dibawah	Danau Kembar	5,62	3,00	16,90
3	Danau Talang	Danau Kembar	1,50	0,88	1,30
4	Danau Singkarak	X Koto Singkarak, Junjung Sirih	20,75	6,25	129,70

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

Danau-danau yang ada di Kabupaten Solok pada umumnya dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, pengendalian banjir dan irigasi. Bahkan potensi air danau juga dimanfaatkan sebagai pembangkit Listrik Tenaga Air yaitu PLTA Ombilin yang memanfaatkan potensi air Danau Singkarak untuk memenuhi pasokan listrik di kawasan Sumatera Tengah (Riau dan Jambi)

b. Mata Air

Dari kondisi alam yang terdapat di Kabupaten Solok banyak dijumpai mata air yang berasal dari lembah atau kaki perbukitan. Hal ini disebabkan adanya lapisan batuan yang kedap air dibawahnya yang mengalami peregangan tidak terus ke dalam melainkan ke arah lateral dan muncul di kaki tebing (lembah) atau kaki perbukitan sebagai mata air. Adanya mata air dapat dimanfaatkan menjadi cadangan sumber air bersih

Pemanfaatan sumber mata air di Kabupaten Solok sebagian besar dikelola/dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok, seperti di Kecamatan Kubung, Nagari Selayo dan Nagari Gaung. PDAM juga memanfaatkan sumber mata air di Kecamatan X Koto Diatas Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Singkarak Nagari Kacang dan Koto Sani dan Kecamatan Lembang Jaya Nagari Koto Anau. Pemanfaatan lainnya adalah sebagai air kemasan oleh Perusahaan Air Minum AQUA dan juga Perusahaan air minum lokal dalam bentuk air beku dan juga depot air minum.

c. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh faktor hujan, luas dan kondisi daerah peresapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah bebas yang cukup besar dapat dijumpai di sekitar Kota Solok dan Muara Labuh yang berkisar antara 1 - 3 meter dibawah permukaan air tanah.

Sedangkan di wilayah lainnya relatif berkedudukan dalam, yaitu berkisar antara 5 - 15 meter dibawah permukaan air tanah, kecuali sekitar daerah lembah yang agak lebar dengan air tanahnya yang dangkal.

1.5 Klimatologi

Secara umum daerah Kabupaten Solok beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 12°C hingga 30°C. Ketinggian daerah berkisar antara 329 sampai 1.458 meter di atas permukaan laut. Daerah bagian Utara mempunyai curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan bagian Tengah dan Selatan dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 169,515 mm/tahun dan hampir merata di sepanjang tahun dengan hari hujan berkisar rata-rata 15 hari/ bulan.

1.6 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012 - 2031 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Solok terdiri atas :

- a. Kawasan Lindung, Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten Solok meliputi :

- 1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung dengan luas seluruhnya lebih kurang 118.141 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Solok kecuali Kecamatan Bukit Sundi. Luas kawasan hutan lindung ini 31,60 % dari luas wilayah Kabupaten Solok.

- 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang meliputi wilayah Kecamatan Gunung Talang, Lembang Jaya, Payung Sekaki, Bukit Sundi, Hiliran Gumanti dan Tigo Lurah.

- 3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.

- 4) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Kawasan suaka alam dengan luas lebih kurang 47.279 Ha meliputi Kawasan Suaka Alam Barisan I, Kawasan Suaka Alam Air Tarusan dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam ini 12,65 % dari luas wilayah Kabupaten Solok.

- 5) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan kawasan rawan bencana gempa bumi/gerakan tanah.

- 6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan letusan Gunung Berapi Gunung Talang dan rawan bencana akibat pergeseran patahan Sumatera (Sesar Semangko).

b. Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Solok terdiri atas :

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas; kawasan hutan produksi terbatas (dengan luas lebih kurang 12.793 Ha), kawasan hutan produksi tetap (dengan luas lebih kurang 5.685 Ha), kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (dengan luas lebih kurang 9.810 Ha) atau sebesar 7,57 % dari luas wilayah Kabupaten Solok.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas; kawasan pertanian tanaman pangan (dengan luas lebih kurang 33.974 Ha), kawasan tanaman hortikultura (dengan luas lebih kurang 72.475 Ha), kawasan perkebunan (dengan luas lebih kurang 42.778 Ha) dan kawasan peternakan diarahkan di seluruh kecamatan. Luas kawasan pertanian ini adalah 39,92 % dari luas wilayah Kabupaten Solok.

3) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas; kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar (dengan luas lebih kurang 10.182,5 Ha), kawasan peruntukan perikanan tangkap perairan danau (dengan Luas 168,95 Ha). Luas kawasan perikanan ini adalah 10.351,45 Ha atau 2,77 % dari luas wilayah Kabupaten Solok.

4) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas; kawasan pertambangan mineral, batubara dan batuan serta energi.

5) Kawasan Peruntukan Permukiman,

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas; kawasan permukiman perkotaan (dengan luas lebih kurang 1.348 Ha) dan kawasan permukiman pedesaan (dengan luas lebih kurang 5.690 Ha).

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata,

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas; kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya.

7) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas; kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil.

8) Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan kawasan keamanan

Berikut luas lahan menurut penggunaannya :

Tabel 3
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya

No	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	
		2014	2015
1	Sawah	23.535	23.426
2	Pekarangan atau bangunan dan halaman sekitarnya	7.028	7.153
3	Tegal/kebun/ladang/huma	38.557	38.862
4	Perkebunan	9.617	10.082
5	Hutan negara	145.320	145.320
6	Hutan rakyat	61.143	60.893
7	Sementara tidak diusahakan	32.957	32.492
8	Semak-semak/alang-alang	3.505	3.431
9	Rawa-rawa	4	4
10	Kolam	334	334
11	Lain-lain	51.800	51.803
	Jumlah	373.800	373.800

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

2. Aspek Demografi

Berdasarkan Kabupaten Solok dalam angka Tahun 2016 oleh BPS, jumlah penduduk Tahun 2015 berjumlah 363.684 jiwa yang terdiri atas 179.721 Jiwa (49 %) penduduk Laki – laki dan 183.963 jiwa (51 %) penduduk perempuan. Dengan pertumbuhan sebesar 0,71 %. Sedangkan angka rasio jenis kelamin Tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk

perempuan sebesar 97,69. Jumlah penduduk yang terbesar terdapat di Kecamatan Kubung 58.677 jiwa dan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Payung Sekaki berjumlah 8.303 jiwa.

Tabel 4
Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk
Per Kecamatan Pada Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Penduduk	Kepadatan
1.	Pantai Cermin	366,00	20.841	57
2.	Lembah Gumanti	459,72	57.392	125
3.	Hiliran Gumanti	263,28	16.838	64
4.	Payung Sekaki	364,50	8.303	23
5.	Tigo Lurah	602,50	10.065	17
6.	Lembang Jaya	99,90	26.820	268
7.	Danau Kembar	70,10	19.722	281
8.	Gunung Talang	385,00	49.485	129
9.	Bukit Sundi	109,00	23.596	216
10.	IX Koto Sungai Lasi	171,00	9.748	57
11.	Kubung	192,00	58.677	306
12.	X Koto Diatas	257,00	17.964	70
13.	X Koto Singkarak	295,50	32.213	109
14	Junjung Sirih	102,50	12.019	117
	Jumlah	3.738,00	363.684	97,29

Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2016

Kepadatan penduduk di Kabupaten Solok Tahun 2015 mencapai 97,29 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kubung dengan kepadatan 306 jiwa/Km² sedangkan yang paling kecil terdapat di Kecamatan Tigo Lurah sebesar 17 jiwa/Km².

Selanjutnya untuk melihat data tentang jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 5

**Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Di Kabupaten Solok Tahun 2015**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	19.985	19.261	39.246
5 – 9	19.777	19.194	38.971
10 – 14	18.405	17.795	36.200
15 – 19	16.525	15.972	32.497
20 – 24	13.498	13.297	26.795
25 – 29	14.427	13.945	28.372
30 – 34	12.532	12.980	25.512
35 – 39	11.860	12.246	24.106
40 – 44	10.688	11.422	22.110
45 – 49	9.975	10.798	20.773
50 – 54	9.199	10.053	19.252
55 – 59	8.414	8.847	17.261
60 – 64	5.745	5.930	11.675
65 – 69	3.479	4.122	7.601
70 – 74	2.574	3.451	6.025
75 +	2.638	4.650	7.288
Jumlah	179.721	183.963	363.684

Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 0 - 4 tahun merupakan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Solok dengan jumlah penduduk sebanyak 39.246 orang dan diikuti dengan kelompok umur 5 - 9 Tahun sebanyak 38.971 orang.

Dan jika di lihat dari Jumlah penduduk menurut kelompok umur paling banyak terdapat pada kisaran umur 25–49 Tahun sebanyak 129.368 jiwa, selanjutnya diikuti oleh penduduk dengan kisaran umur 49–65 tahun keatas sebanyak 120.873 dan penduduk dengan usia kisaran 0–24 Tahun berjumlah 113.439 jiwa. Ini artinya jumlah usia produksi masih banyak di Kabupaten Solok.

Kemudian jumlah Penduduk yang berusia 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatannya, berjumlah 249.748 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Angkatan Kerja sebanyak 170.984 jiwa yang terdiri dari 164.191 jiwa

yang bekerja dan 6.793 jiwa berstatus mencari kerja; dan

2. Bukan Angkatan kerja sebanyak 78.764 jiwa yang terdiri dari yang bersekolah sebanyak 26.961 jiwa, ibu Rumah tangga 41.720 jiwa dan lainnya sebanyak 10.083 jiwa.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kegiatannya Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
L	Angkatan Kerja	99.439	71.545	170.984
	a. Bekerja	95.926	68.265	164.191
	b. Mencari Pekerjaan	3.513	3.280	6.793
LI	Bukan angkatan Kerja	22.313	56.451	78.764
	a. Sekolah	13.195	13.766	26.961
	b. Mengurus rumah tangga	1.756	39.964	41.720
	c. Lainnya	7.362	2.721	10.083
	Jumlah	121.752	127.996	249.748

Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2016

Banyaknya penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha berjumlah 164.191 jiwa, paling banyak terdapat di sektor Pertanian, kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebanyak 98.050 jiwa, kemudian disusul oleh jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel sebanyak 26.969 jiwa, kemudian jasa kemasyarakatan, social dan perorangan sebanyak 18.626 jiwa dan lainnya sebanyak 16.485 jiwa. Dan yang paling sedikit bekerja di industri pengolahan sebanyak 4.061 jiwa. Dan jika di lihat dari banyaknya penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan, paling banyak terdapat penduduk yang Tidak tamat SD, Tamat SD dan SMP sebanyak 73 % .

Tabel 7
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	56 272	41 778	98 050
2	Industri Pengolahan	3 336	725	4 061
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	12 537	14 432	26 969
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	8 246	10 380	18 626
5	Lainnya	15 535	950	16 485
	Jumlah	95 926	68 265	164 191

Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam angka Tahun 2016

3. Aspek Sosial

3.1. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok tergambar pada data-data jumlah Keluarga Prasejahtera (sangat miskin) dan Keluarga Sejahtera I (miskin) dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014.

Tabel 8
Perkembangan Jumlah Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Di Kabupaten Solok Tahun 2010-2014

No	Klasifikasi Keluarga	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pra Sejahtera	8.979	8.357	9.105	9.637	8.855
2	Sejahtera I	18.966	18.346	18.427	19.454	18.715
3	Jumlah Keluarga	92.308	92.715	93.169	95.204	96.574
4	Persentase	30,27	28,80	29,55	30,56	28,55

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok

Pada Tahun 2014 jumlah persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Solok adalah 28,55 %, angka ini jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2013 mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan tidak lagi melakukan pendataan terhadap Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I, hal ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

dimana instansi yang berwenang mengeluarkan data tentang kemiskinan adalah SKPD yang menangani urusan sosial.

Sementara jika dilihat dari indikator kemiskinan, maka dari Tahun 2010 s/d 2015 dapat terlihat perkembangan kemiskinan di Kabupaten Solok pada Tabel berikut :

Tabel 9
Perkembangan Indikator Kemiskinan
Kabupaten Solok Tahun 2010 - 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,25	88,81	89,97	89,74	90,58	*90,96
2	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	265.342	279.674	296.812	316.756	329.385	*345.955
3	Poverty Gap Index/ P_1 (%)	1,80	1,62	1,09	1,37	0,80	*0,02
4	Poverty Severity Index/ P_2 (%)	0,41	0,37	0,22	0,29	0,14	*0,09
5	Persentase Penduduk Miskin / Po	11,75	11,19	10,03	10,26	9,42	*9,04

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016 (*Angka sementara)

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Data pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penduduk di atas garis kemiskinan semakin meningkat walaupun sempat turun pada Tahun 2013. Dengan semakin meningkatnya penduduk yang berada di atas garis kemiskinan menandakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan. Berdasarkan indikator *Poverty Gap Index/ P_1* dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014, penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan *Poverty Severity Index/ P_2* mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Walaupun Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami penurunan namun pemerintah Kabupaten Solok masih harus terus berupaya agar pada tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk miskin semakin turun mengingat angka kemiskinan Kabupaten Solok masih di atas angka kemiskinan propinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Solok mencapai 9,04 % sedangkan angka kemiskinan Propinsi Sumatera Barat sebesar 6,71 %.

3.2. Pendidikan

Analisis kinerja urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dari aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum. Pada Aspek kesejahteraan masyarakat kinerja urusan pendidikan, indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan upaya pembangunan adalah angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi murni.

Perkembangan indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni di Kabupaten Solok dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 10
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf (%)	97,19	97,21	97,24	97,40	97,50	99,87
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,60	8,03	8,04	8,05	8,65	8,66
3	Angka Partisipasi Kasar (%) :						
	- APK SD/MI/Paket A	113,46	109,58	121,39	108,71	115,12	110,95
	- APK SMP/MTs/Paket B	84,02	82,11	83,27	83,71	93,86	93,25
	- APK SMA/SMK/MA/Paket C	50,88	56,11	54,96	56,83	55,27	59,16
4	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%) :						
	- APT SD/MI/Paket A	28,17	26,24	25,40	28,50	29,29	28,49
	- APT SMP/MTs/Paket B	16,47	15,56	16,68	17,37	17,37	17,37
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C	14,29	12,87	13,72	14,37	14,37	12,37
5	Angka Partisipasi Murni						

No	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(%) :						
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,76	94,25	94,61	93,12	98,67	94,99
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65,13	61,44	62,31	65,44	73,83	72,92
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	36,18	45,57	43,98	46,48	41,52	48,44

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha pemerintah Kabupaten Solok untuk meningkatkan angka melek huruf menunjukkan hasil yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian angka melek huruf Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 maka angka melek huruf Kabupaten Solok Tahun 2015 masih berada di bawah angka melek huruf Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu sebesar 99,92 %.

Dengan semakin meningkatnya angka melek huruf tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok yang buta huruf semakin berkurang dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, karena pertumbuhan penduduk terus mengalami kenaikan maka upaya peningkatan jumlah penduduk melek huruf masih perlu diupayakan untuk masa yang akan datang.

Pada Tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Solok baru mencapai 8,66 Tahun artinya setara dengan tingkat SLTP, angka ini berada di atas capaian rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu 8,29 Tahun. Kenaikan rata-rata lama sekolah pertahun baru mencapai 0,2 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini didukung oleh program pemerintah Kabupaten Solok dalam bentuk pemberian bea siswa serta beasiswa dari lembaga lainnya.

Selanjutnya adalah indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2015, APK pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014, sedangkan APK pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan APK pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat justru mengalami penurunan dibanding capaian pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2015, seperti halnya Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar atau sederajat dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP atau sederajat mengalami penurunan dari capaian pada Tahun 2014, namun Angka Partisipasi Murni (APM) SMA atau sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014.

Berdasarkan perkembangan APK dan APM selama 5 tahun terakhir dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan SD atau sederajat dan pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat sangat baik. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih kurang, kondisi ini diantaranya disebabkan oleh banyaknya masyarakat Kabupaten Solok mengirim anaknya untuk bersekolah di luar Kabupaten Solok seperti ke Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan lain-lain. Dari data-data tersebut juga dapat dilihat bahwa APK maupun APM ditingkat pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan APK dan APM ditingkat pendidikan SLTP dan SLTA, hal ini merupakan dampak adanya program wajib belajar 9 Tahun.

Selanjutnya indikator urusan pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT). Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada jenjang pendidikan SD atau sederajat mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014. Sedangkan APT pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat tidak mengalami perubahan dan APT pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2014.

3.3. Kesehatan

Pada Aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja urusan kesehatan ditunjukkan oleh indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, dan Persentase Balita Gizi Buruk. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2010 - 2015

NO	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kelangsungan hidup bayi (orang)	988,04	991,93	986,72	985,74	982,63	983,53
2	Angka usia harapan hidup (Tahun)	66,60	66,95	67,26	67,50	70,02	*70,02
3	Persentase balita gizi buruk	0,031	0,036	0,044	0,048	0,027	0,024

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2016 (*Angka sementara)

Pada bidang kesehatan dapat dilihat bahwa angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mencapai umur 70,02 Tahun. Angka usia harapan hidup ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, ini menandakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Solok meningkat dari waktu ke waktu selama lima tahun terakhir. Capaian ini berada di atas capaian usia harapan hidup propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu sebesar 68, 32 Tahun.

Kemudian jika dilihat dari indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, perkembangan indikator ini dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 terus mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2014 angka ini menjadi sebesar 982,63. Angka 982,63 menunjukkan bahwa dari 1.000 bayi yang lahir 982,63 orang hidup dan 17,37 bayi meninggal. Angka Kelangsungan Hidup Bayi yang terus mengalami penurunan ini sama artinya dengan semakin tingginya Angka Kematian Bayi. Kondisi ini pada Tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sehingga mencapai angka sebesar 983,53, dengan meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi berarti Angka Kematian Bayi justru mengalami penurunan. Sedangkan angka persentase balita gizi buruk mengalami penurunan sehingga pada Tahun 2015 menjadi sebesar 0,024 % dengan jumlah balita gizi buruk berkurang dari 10 pada Tahun 2014 menjadi 9 pada Tahun 2015.

3.4. Tenaga Kerja

Perkembangan kinerja urusan Tenaga Kerja dapat dilihat dari indikator rasio penduduk yang berkerja. Perkembangan indikator tersebut

dari Tahun 2011 - 2014 mengalami fluktuatif dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 maka capaian Tahun 2015 mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Angkatan Kerja dan pada Tahun 2015 mencapai angka sebesar 170.984 orang. Kenaikan pada kedua indikator tersebut tidak diikuti oleh indikator rasio penduduk yang bekerja karena pada Tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja justru mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 12
Perkembangan Rasio Jumlah Penduduk Yang Bekerja
Di Kabupaten Solok Tahun 2010 - 2015

NO	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk yang bekerja (Orang)	161.700	148.795	141.543	136.099	154.971	*164.191
2	Angkatan kerja (Orang)	166.775	158.284	148.611	144.350	160.679	*170.984
3	Rasio penduduk yang bekerja	96,95	94,01	95,24	94,28	96,44	*96,03

Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam Angka (*Angka Sementara)

4. Kondisi Ekonomi

4.1. Potensi Unggulan Daerah

4.1.1. Potensi Pertanian, Perikanan dan Peternakan

a. Potensi Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra produksi padi di Sumatera Barat, untuk itu perlu terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktifitas lahan. Hal ini berkaitan dengan ancaman konversi lahan sawah yang semakin besar. Kalau diamati untuk produksi di tahun 2015 terjadi penurunan produksi padi sebesar 0,45 % dari 352.389,0 Ton di tahun 2014 menjadi 336.483,5 ton di tahun 2015. Dari angka tersebut perlu terus di dorong peningkatan untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan dari waktu ke waktu.

Tabel 13

Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija

N0	Komoditi	2014			2015		
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ha)
1	Pasi Sawah	61.035	61.035	352.389	62.471	60.595	336.483
2	Padi Ladang	0	0	0	0	0	0
3	Jagung	590	287	1.626	599	219	1.270,7
4	Ubi Kayu	242	262	10.722,3	224	259	10.599
5	Ubi Jalar	1.054	1.038	42.883,7	998	1.019	42.087,2
6	Kacang Tanah	157	157	342,7	128	140	304,9
7	Kacang Kedelai	52	47	77,8	26	23	38
8	Kacang Hijau	28	31	39,4	4	7	8,9

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

Untuk Tanaman Jagung, jumlah produksi paling banyak terdapat di Kecamatan Pantai Cermin sebanyak 409,5 Ton, dilanjutkan dengan Kecamatan Kubung sebanyak 231 Ton, X Koto Diatas sebanyak 104,5 Ton, Lembah Gumanti 100,8 Ton.

Produksi Tanaman Ubi Kayu paling banyak terdapat di Kecamatan Kubung sebanyak 1.402,2 Ton di lanjutkan oleh Kecamatan Pantai Cermin dengan jumlah produksi 1.351 Ton dan Lembang Jaya sebanyak 1.309,5 Ton.

Tanaman Ubi Jalar banyak terdapat di Kecamatan Lembang Jaya dengan produksi sebanyak 16.309 Ton, disusul oleh Kecamatan Lembah Gumanti dengan produksi sebesar 11.024 Ton dan Kecamatan Gunung Talang sebesar 7.395 Ton.

Tanaman Kacang Tanah paling banyak terdapat di Kecamatan Pantai Cermin sebanyak 178,76 Ton. Sedangkan kecamatan lain produksinya berupa Kacang Tanah dengan produksi berada di bawah 50 Ton.

Untuk Kacang Kedelai paling banyak terdapat di Kecamatan Payung Sekaki dengan jumlah produksi hanya 18,04 Ton.

Tabel 14

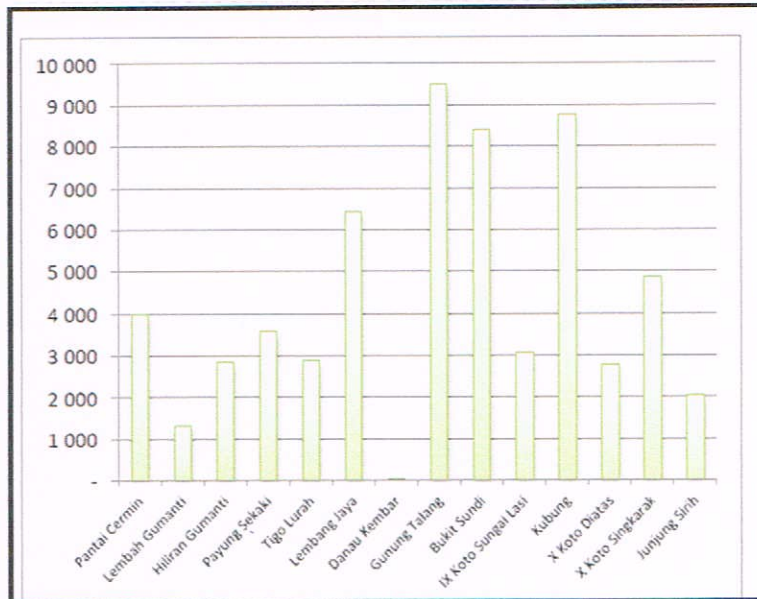
Produksi Padi Sawah Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produksi tivitas (Ton/Ha)
1	Gunung Talang	9,767	9,496	58,115.5	5.8
2	Bukit Sundi	8,800	8,399	51,569.9	6.7
3	Kubung	8,923	8,776	50,462.4	6.2
4	Lembang Jaya	6,554	6,452	32,001.9	6
5	X Koto Singkarak	4,901	4,875	28,372.2	6.3
6	Payung Sekaki	3,601	3,573	18,579.6	5.1
7	Pantai Cermin	4,301	3,978	18,457.9	4.9
8	IX Koto Sungai Lasi	3,102	3,067	15,856.4	5.5
9	X Koto Diatas	3,113	2,790	15,596.1	5.1
10	Hiliran Gumanti	3,097	2,865	14,525.6	4.9
11	Tigo Lurah	2,987	2,901	14,969.2	4.5
12	Junjung Sirih	1,917	2,062	12,578.2	6.2
13	Lembah Gumanti	1,391	1,327	5,281.5	3.4
14	Danau Kembar	17	34	117.3	3.5
Jumlah		62,471	60,595	336,483.7	5.7

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka 2016

Luas panen Padi perkecamatan disajikan dalam grafik berikut ini:

Gambar 2. Grafik luas panen Padi Per Kecamatan



Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam angka Tahun 2016

b. Potensi Pertanian Tanaman Hortikultura

Secara keseluruhan untuk tanaman sayuran terjadi peningkatan produksi yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2015 terutama pada komoditi Tomat sebesar 0,08 %.

Tabel 15

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran

N0	Komoditi	2014			2015		
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
			4 213	3 125	21	101	336483,6
1	Bawang Merah	5 422	5 372	58 502,20	4 898	5 004	57 364,0
2	Bawang Putih	106	122	786,2	91	77	494,4
3	Bawang Daun	608	595	5 290,30	681	653	6 606,9
4	Kentang	2 532	2 514	49 902,30	2 397	2 648	50 865,6
5	Kubis	1 648	1 601	54 578,40	1 565	1 614	55 021,6
6	Petsai dan Sawi	319	307	2 454,40	340	347	2 738,1
7	Kacang Panjang	111	114	1 152,30	92	111	1 184,4
8	Cabe	1 652	1 886	19 836,40	1 682	1 980	19 917,9
9	Tomat	1 639	1 727	53 180,20	1 647	1 903	57 816,7
10	Terung	112	121	1 006,40	87	116	1 117,8
11	Buncis	512	563	5 329,80	517	563	5 080,6
12	Ketimun	60	69	737,4	62	62	818
13	Kangkung	64	64	343,6	74	72	389,8
14	Bayam	81	84	426,1	95	101	420,4
15	Wortel	399	436	10 807,20	552	511	12 299,4
16	Cabe Rawit	62	84	838	54	68	651,7
17	Labu Siam	4	42	599,1	1	40	555,1

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

Sementara komoditas buah-buahan terbanyak dihasilkan dari Markisa yang diproduksi sekitar 88.828,90 ton pada tahun 2015. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Solok merupakan penghasil Markisa terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Sementara Nenas merupakan komoditas terkecil yang hanya dihasilkan 6,8 ton pada tahun yang sama. Sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

Tabel 16
Produksi Holtikultura menurut Jenis Buah-buahan
Tahun 2015

No	Komoditi	2014			2015		
		Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Alpoket	221 456	102 997	25 235,70	220 919	115 592	34 205,20
2	Duku/ Langsat	3 713	271	11,5	3 542	1 018	37,1
3	Durian	150 022	52 921	4 210,60	149 592	65 927	4 271,90
4	Jambu Biji	21 063	2 692	285,1	18 166	6 086	446,3
5	Jeruk	280 174	31 592	3 316,20	254 401	41 355	3 089,40
6	Mangga	13 138	6 925	534,3	12 507	4 502	330,3
7	Manggis	36 157	3 490	238,2	42 299	16 487	1 069,00
8	Nangka	10 135	6 222	675,9	9 618	4 250	581
9	Pisang	183 637	150 542	17 026,00	154 472	132 250	12 921,00
10	Nenas	3 568	2 087	8,6	3 338	1 525	6,8
11	Pepaya	20 427	9 221	1 258,70	19 502	14 238	1 617,80
12	Rambutan	91 466	9 403	515	88 457	34 836	1 878,70
13	Sawo	13 864	6 134	1 097,80	13 636	7 457	941,7
14	Markisa	1 033 911	975 862	92 983,70	1 021 135	876 185	88 828,90
15	Sirsak	18 664	5 109	262,6	18 771	8 633	524,1
16	Sukun	3 032	185	24,7	2 989	2 190	172,8

Sumber :BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

c. Potensi Pertanian Tanaman Perkebunan

Berbagai komoditi perkebunan terdapat di Kabupaten Solok seperti Karet, Kelapa, Kayu Manis, Cengkeh, Kopi, Kemiri dan Teh. Kecuali teh, komoditi lainnya di Kabupaten Solok masih berbentuk perkebunan rakyat.

Tabel 17
Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2015

No	Komoditi	2014		2015	
		Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	2 219,30	1 958,80	2 219,30	1 958,80
2	Karet	4 439,80	1 143,40	4 439,80	1 143,40
3	Kopi	8 274,25	3 134,40	8 274,05	3 134,00
4	Cengkeh	2 513,55	340.6	2 513,55	340.6
5	Kulit Manis	7 274,75	372.05	7 274,75	372.1
6	Jahe	0	0	0	0
7	Tebu	595.5	849.6	695.5	849.6
8	Cokelat	3 922,50	1 365,80	3 922,50	1 365,80
9	Tembakau	13	4.3	13	4.3
10	Pala	96	11.71	96	11.71
11	Anau	140.25	178.83	140.26	37.6
12	Kemiri	1 135,25	793.45	1 135,25	793.45
13	Teh	0	0	0	0
14	Kapuk	66.5	46.25	66.5	46.25
15	Pinang	517.5	79.72	522.75	15.9
16	Gardamon	753	53.72	751	16

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

d. Potensi Perikanan

Di Tahun 2015 luas area penangkapan ikan yang terbesar terdapat di kolam dengan produksi sebesar 1.588,91 Ton, dan diikuti oleh usaha perikanan yang dilakukan di danau yaitu sebesar 229,88 Ton.

Tabel 18
Luas dan Produksi Ikan Menurut Jenis Usaha
di Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Jenis Usaha Perikanan	Luas Areal Penangkapan (Ha)	Produksi(Ton)
1	Di Kolam	374,06	1 588,91
2	Di sawah	34,49	45,04
3	Di Danau	9 018,00	229,88
4	Di Telaga	49,9	22,27
5	Di Sungai	859,81	150,03
6	Di Rawa	4	4,54

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

e. Potensi Peternakan

Untuk subsektor peternakan, ternak besar di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 mengalami peningkatan populasi dibandingkan tahun sebelumnya kecuali kambing/domba dan itik mengalami penurunan produksi sebesar 3,25 %. Kerbau juga mengalami peningkatan populasi sebesar 1,27 %. Begitu juga dengan ikan, juga mengalami peningkatan.

Tabel 19
Populasi Ternak dan Hasil Ternak lainnya menurut Jenis
di Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Sapi	Ekor	36 219	37 025	38 268
2	Kerbau	Ekor	9 983	10 004	10 133
3	Kambing / Domba	Ekor	18 943	19 364	16 608
4	Kuda	Ekor	253	253	348
5	Itik /Unggas lainnya	Ekor	131 695	136 837	124 235
6	Ayam Kampung	Ekor	271 377	277 977	248 196
7	Ayam Ras	Ekor	313 833	415 943	2 964 415
8	Burung Puyuh	Ekor	2 500	14 500	97 860
9	Telur Itik	Kg	720 549	723 269	750 686
10	Telur Ayam Kampung	Kg	146 142	149 122	152 192
11	Telur Ayam Ras	Kg	416 325	422 011	22 745
12	Susu	Liter	78 170	61 543	86 916

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

f. Potensi Pariwisata

Kabupaten Solok terkenal dengan pesona alam, budaya maupun sejarahnya. Keunggulan ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dapat mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin. Dengan peningkatan kunjungan wisatawan ini, diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 20

Banyaknya Objek Wisata Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Objek Wisata			
		Alam	Budaya	Buatan	Total
1	Pantai Cermin	7	3	-	10
2	Lembah Gumanti	6	3	1	10
3	Hiliran Gumanti	10	5	-	15
4	Payung Sekaki	5	5	-	10
5	Tigo Lurah	4	-	-	4
6	Lembang Jaya	4	2	-	6
7	Danau Kembar	9	-	-	9
8	Gunung Talang	6	6	2	14
9	Bukit Sundi	3	5	-	8
10	IX Koto Sungai Lasi	9	3	1	13
11	Kubung	13	7	6	26
12	X Koto Singkarak	16	6	2	24
13	Junjung Sirih	4	5	-	9
14	X Koto Diatas	13	18	-	31
Jumlah		109	68	12	189

Sumber : Ripparda Kabupaten Solok Tahun 2013

Adanya pemandangan alam berupa panorama Danau Singkarak, Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang, Goa-goa serta Agrowisata, *Teawalk*, Janjang Seribu dan objek lainnya, merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik. Tidak ketinggalan juga adanya wisata sejarah dan budaya berupa Makam Dt.Parpatiah Nan Sabatang yang merupakan Bapak Demokrasi Adat Minang Kabau Kalarasan Bodi Chaniago.

Dalam pengembangan pariwisata tahun 2016–2021 akan di prioritaskan pada tiga kawasan yaitu Danau Singkarak dan sekitarnya, kawasan Danau Kembar dan sekitarnya dan Taman Hutan Kota Terpadu dan sekitarnya.

Dari segi budaya terdapat arsitektur rumah gadang di beberapa lokasi di Kabupaten Solok. Objek wisata tersebut ramai dikunjungi hampir semua lapisan masyarakat dari yang muda sampai orang tua. Untuk menempuh lokasi tersebut sudah ada peta wisata Kabupaten Solok yang akan memudahkan bagi para wisatawan domestik atau luar negeri untuk berkunjung ke objek wisata

Tabel 21
Arus Wisata Yang Berkunjung Ke Objek Wisata
Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Kecamatan	Mancanegara	Dalam Negeri	Jumlah
1	Danau Diatas	94	22 229	22 323
2	Danau Dibawah	152	34 314	34 466
3	Danau Singkarak	506	281 856	282 362
4	Danau Talang	Data belum tersedia	Data belum tersedia	-
5	Dan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Total	2015	752	338 399	339 151
	2014	508	440 066	440 574
	2013	588	437 464	438 052

Sumber : BPS, Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2016

Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun manca negara ke Kabupaten Solok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan ini sangat dipengaruhi promosi melalui postingan-postingan di media sosial seperti facebook, instagram dan lain-lain oleh pengunjung sebelumnya. Dan jika dilihat dari industri pariwisata masih perlu pengembangan dan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Berikut industri pariwisata di Kabupaten Solok.

Tabel 22
Industri Pariwisata Di Kabupaten Solok Tahun 2015

No	Industri Pariwisata	Jumlah
1	Hotel	1
2	Penginapan	13
3	Rumah Makan	82

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

Jumlah industri pariwisata tersebut diatas masih tetap di tahun sebelumnya.

g. Potensi Usaha Kecil dan Menengah

Sektor perdagangan memiliki potensi yang lebih menjanjikan untuk dikembangkan, terutama di sektor kerajinan/industri kecil dan industri pangan. Pertumbuhan ini didukung oleh subsektor perdagangan eceran, subsektor hotel dan subsektor restoran. Diharapkan pada masa yang akan datang terjadi penambahan investasi di bidang industri kecil dan kerajinan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar.

Tabel 23
Jumlah Industri Kecil / Kerajinan di Kabupaten Solok
Tahun 2015

No	Jenis Industri	2012	2013	2014	2015
1	Industri Sandang	121	121	294	294
2	Industri Pangan	614	644	2 483	2 491
3	Industri Kerajinan	620	620	228	229
4	Industri Kimia, Bahan Bangunan	424	428	516	0
5	Industri Logam, Mesin dan Perbengkelan	140	140	574	576
	Jumlah / Total	1 919	1 953	4 095	3 590

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

h. Potensi Pertambangan dan Galian

Potensi bahan tambang dan galian di Kabupaten Solok sangat beragam dan tersebar di seluruh Kecamatan. Jenis galian yang ada antara lain Tanah urug, biji besi, kalsit dan sirtukil dengan rincian produksi sebagai berikut :

Tabel 24
Produksi pertambangan Menurut Jenis Galiannya Tahun 2015

No	Jenis galian	Jumlah Usaha	Jumlah Produksi
1	Tanah Urug	2	720 (m3)
2	Batu Bara	2	-
3	Biji Besi	31	-
4	Tembaga	6	-
5	Kalsit	2	40117 (m3)
6	Sirtukil	18	73578 (m3)

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

4.1.2. Aspek Kelembagaan

a. Pasar

Pasar merupakan sarana penunjang yang sangat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk kondisi Pasar di Kabupaten Solok dapat

dilihat di tabel data pasar terlampir pada Lampiran III, dimana terdapat 3 buah Pasar Serikat, 32 Pasar Nagari dan 6 Pasar Khusus.

b. Keuangan dan Pembiayaan Masyarakat

Lembaga perbankan/keuangan yang ada dalam mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Solok sangat berperan dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Solok. Pada umumnya lembaga-lembaga tersebut masih didominasi oleh bank-bank yang tersebar di beberapa kecamatan sebagaimana dirinci pada Tabel dibawah ini :

Tabel 25
Jenis Lembaga Perbankan/Keuangan di Kabupaten Solok Tahun 2013

No	Nama Lembaga	Jumlah	Lokasi	Ket
1	Bank Nagari (BPD Sumbar)	2	• Alahan Panjang • Arosuka	
2	Bank Rakyat Indonesia	8	• Koto Baru • Selayo • Arosuka • Alahan Panjang • Surian • Muara Panas • Sumani • Talang	
3	Bank Perkreditan Rakyat	4	• BPR MOS Muara Panas • BPR Gunung Talang • BPR Guguak Sarai • BPR Singkarak	
4	Pegadaian	3	• Koto Baru • Selayo • Alahan Panjang	
	Jumlah	17		

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Solok Tahun 2013

c. Kelembagaan Tani

Kelembagaan Tani/ kelompok tani yang ada di Kabupaten Solok pada Tahun 2015 berjumlah 1.299. Jumlah ini meningkat dibandingkan di tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.218 kelompok Tani. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai usaha pertanian, peternakan dan juga perikanan

Tabel 26

Kelompok Tani Menurut Usaha Dominan Kelompok

No	Jenis Usaha Kelompok	Jumlah Kelompok Tani
1.	Padi/ ikan	1.013
2.	Hortikultura	200
3.	Ternak	13
4.	Perkebunan	10
5.	Ikan	1
6.	Padi/ Hortikultura	30
7.	Padi / Perkebunan	14
8.	Padi / ikan	2
9.	Padi/ Ternak	14
10	Ternak/ ikan	1
11	Hortikultura	1
	2015	1.299
	2014	1.218
	2013	1.483

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016

Sedangkan Gabungan Kelompok Tani dengan jumlah 86 Gapoktan, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berbadan hukum sebanyak 76 P3A, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebanyak 74 LKMA, Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) sebanyak 31 UPJA

d. Sarana dan Prasarana Penunjang Pertanian

Sedangkan Sarana dan prasarana penunjang pertanian lainnya di Kabupaten Solok sebagai berikut :

- Balai Benih Induk (BBI) Padi, Balai Benih Utama (BBU) Kentang dan Balai Benih Induk (BBI) Ikan terdapat
- Stasiun Klimatologi Pertanian Khusus (SKPK) di Sungai Nanam
- Trading House di Sungai Nanam
- Sub Terminal Agribisnis (STA) di Sungai Nanam
- Kios Saprodi tersebar di daerah sentra produksi
- Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) di Alahan Panjang
- Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

- h. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat di Sukarami
- i. Laboratorium Hama & Penyakit
- j. Balai Penelitian Buah (Balitbu) Tropika di Sumani
- k. UPT Dinas Pertanian di 4 wilayah Kabupaten Solok

Sarana dan prasarana penunjang pengembangan peternakan di Kabupaten Solok antara lain:

- a. UPT Pusat Perbibitan Ternak di Arian
- b. Pasar Ternak Muara Panas, Pasar Ternak Alahan Panjang dan Pasar Ternak Modern di Guguk Sarai
- c. Pos Kesehatan Hewan 3 unit (Alahan Panjang, Koto Baru dan Sumani)
- d. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebanyak 7 unit
- e. Pos Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 18 unit
- f. UPT Dinas Perikanan dan Peternakan di 4 wilayah Kabupaten Solok

e. Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Terhadap aspek sistem inovasi dan alih teknologi di daerah, maka keberadaan berbagai lembaga penelitian di Kabupaten Solok menunjang proses inovasi dan alih teknologi di daerah :

1. BPTP Sumbar di Sukarami

Gambar 3. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sukarami



Sumber : Dokumentasi Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat yang berlokasi di Sukarami mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sedangkan fungsi instansi ini antara lain :

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

2. Balitbu Tropika di Arian

Gambar 4. Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu)



Sumber : Dokumentasi Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014

Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika) yang berlokasi di Arian Kecamatan X Koto Singkarak mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian tanaman buah. Sedangkan fungsi instansi ini antara lain :

1. Penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman buah tropika
2. Penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika
3. Penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman buah tropika
4. Penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika

5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman buah tropika
6. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika.

3. Pusat Alih Teknologi Unand di Alahan Panjang

Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Pertanian Universitas Andalas (PATPKP Unand) merupakan satu lokasi pertanian terpadu yang untuk mensinergikan berbagai kegiatan pertanian secara luas sehingga akan memberikan dampak kepada masyarakat tani di sekitar lokasi dan atau siapa saja yang membutuhkan informasi teknologi pertanian. PATPKP Unand berlokasi di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Kawasan ini adalah kawasan alih teknologi yang merupakan tempat dimana proses diseminasi alih teknologi dilakukan sekaligus tempat berinteraksi antara penghasil dan pengguna teknologi.

Gambar 5. Kawasan alih teknologi PKP Unand



Sumber : Dokumentasi Pribadi Prof. Irfan Suliansyah Tahun 2014

Inisiasi PATPKP Unand dimulai pada sekitar pertengahan Tahun 2011. Awalnya lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi pengujian adaptasi tanaman gandum yang berasal dari Republik Slowakia. Pada Tahun 2012 lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kampung industri berbasis gandum atau disebut dengan Kampung Gandum. Kampung industri adalah satu sistem terdiri atas industri primer (sarana produksi dan infrastruktur), industri sekunder (bahan baku untuk industri di desa) dan industri tersier (*processing*) yang menghasilkan produk jadi. Pengembangan Kampung Gandum diarahkan kepada pengembangan agroindustri skala kecil dengan memberdayakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani

(poktan/gapoktan). Untuk itu dibutuhkan dukungan teknologi mulai dari budidaya, pengolahan gandum menjadi tepung, pengolahan tepung menjadi berbagai bentuk panganan yang sederhana dan dapat diterapkan dalam skala industri kecil di pedesaan. Dalam mengembangkan kawasan ini, Universitas Andalas bekerjasama dengan Pondok Pesantren Muhammad Natsir.

Semenjak ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kampung gandum, maka secara berangsur-angsur dilakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung berbagai kegiatan. Pada Tahun 2013, kawasan Industri Berbasis Gandum diperluas cakupan komoditasnya, bahkan sekaligus dijadikan lokasi kegiatan pertanian terpadu (*Integrated Farming System*) yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Kegiatan di PATPKP Unand ini diantaranya adalah :

1. Budidaya dan Pascapanen Gandum
2. Pemuliaan Tanaman Gandum
3. Pembuatan Pakan Ikan (pellet)
4. Budidaya Ikan/Pejantan Ikan
5. Budidaya Cacing Tanah
6. Budidaya Sapi Potong
7. Instalasi Pupuk Organik
8. Budidaya Jamur Tiram
9. Bioremediasi
10. Budidaya Kelinci
11. Budidaya Ayam Kukuak Balenggek
12. Pembibitan Tanaman Kehutanan/MPTS/Perkebunan
13. Perbenihan Tanaman Kentang

4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Presiden.

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari LIPI adalah sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan
2. Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar
3. Penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus
4. Pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI
6. Pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum

Salah satu unit pelayanan teknis LIPI adalah UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia (BPPTK) Yogyakarta yang merupakan institusi setingkat eselon III yang dibentuk berdasarkan SK Kepala LIPI dengan tugas pokok melakukan pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang proses dan teknologi kimia, pangan dan pakan, farmasi dan teknologi lingkungan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UPT BPPTK-LIPI adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan teknologi pengolahan pakan dan budidaya ternak secara terintegrasi dengan produk yang dihasilkan sebagai berikut :
 - 1) Integrated farming system
 - 2) Imbuhan makanan ruminansia
 - 3) Imbuhan pakan unggas
 - 4) Pupuk organik dari residu biogas
 - 5) Pakan silase dari hijauan
2. Pengembangan bahan alam berbasis potensi lokal dan memanfaatkan senyawa aktif untuk membentuk keunggulan produk baru, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan berbasis biomassa serta pengembangan berbagai sumber energi baru dan terbarukan. Adapun produk yang dihasilkan seperti :
 - 1) Olahan mengkudu (teh)
 - 2) Olahan jamur lingzi (kapsul, sirup, teh)
 - 3) Olahan bunga rosela (bunga, teh)
 - 4) Biogas (filter, instalasi biogas)
 - 5) Sabun transparan (sirih, mengkudu, mawar, bengkoang)

3. Pengembangan produk pangan dalam rangka keanekaragaman konsumsi pangan berupa produk pangan fungsional dan diversifikasi pangan untuk memberikan nilai tambah secara manfaat dan ekonomi serta mengembangkan teknologi yang menunjang upaya sadar bencana dalam bentuk makanan yang dihasilkan antara lain :

- 1) Bahan makanan campuran (BMC Tempe, dalam bentuk tepung)
- 2) Kue umbi-umbian bagi penderita diabetes mellitus
- 3) Kue berbahan baku shorgum

Pada Tahun 2015 Kabupaten Solok melaksanakan program penerapan IPTEKDA (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah) dengan kegiatan berupa Pengembangan Makanan Tradisional dan Penguatan Sumber Daya Lokal. Adapun Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi lokasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) UKM Kapuah Saiyo di Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak yang bergerak pada usaha pembuatan keripik dari ubi kayu.
- 2) UKM Laris Manis di Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi yang bergerak pada usaha pembuatan kue dan bermacam-macam panganan lokal.
- 3) UKM Bareh Solok di Salayo, Kecamatan Kubung yang bergerak pada usaha pembuatan kue seperti bolu, brownies dll.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

4.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok

Berdasarkan data penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sistem yang baru dimana tahun dasar yang digunakan tidak lagi Tahun 2000 tapi Tahun 2010 maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama 5 (lima) Tahun terakhir mengalami fluktuatif sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini. Pada Tahun 2015 perekonomian Kabupaten Solok mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan Tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 10,06 %.

Tabel 27
Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,12	5,02	6,16	5,63	*5,79	**5,43

Sumber : BPS, Kabupaten Solok Dalam Angka

(*Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara)

4.1.2 Pendapatan Perkapita

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita penduduk yang dihitung berdasarkan PDRB per Kapita terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 10,22% pada Tahun 2011, 10,46% pada Tahun 2012, 9,61% pada Tahun 2013, 12,10 % pada Tahun 2014 dan 2,34% pada Tahun 2015.

Tabel 28
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	17,67	19,48	21,51	23,71	*26,02	**27,84

Sumber : BPS Kab. Solok (*Angka sementara)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2025, disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dalam pembangunan jangka panjang. RPJP Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam perspektif pembangunan 20 tahun ke-depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu **“Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari Yang Baik.”**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Solok. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG
MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’
BASANDI KITABULLAH”**

Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan.
Maju	:	Artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat yang berpendidikan.
Mandiri	:	Adalah masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan yang sehat
Kehidupan masyarakat madani	:	Adalah masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Tabel 5.1 dibawah memperlihatkan keterkaitan antara visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.

Tabel 29

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSAS ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”	Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat
	Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai
	Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”
	Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

B. Strategi dan Arah kebijakan daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

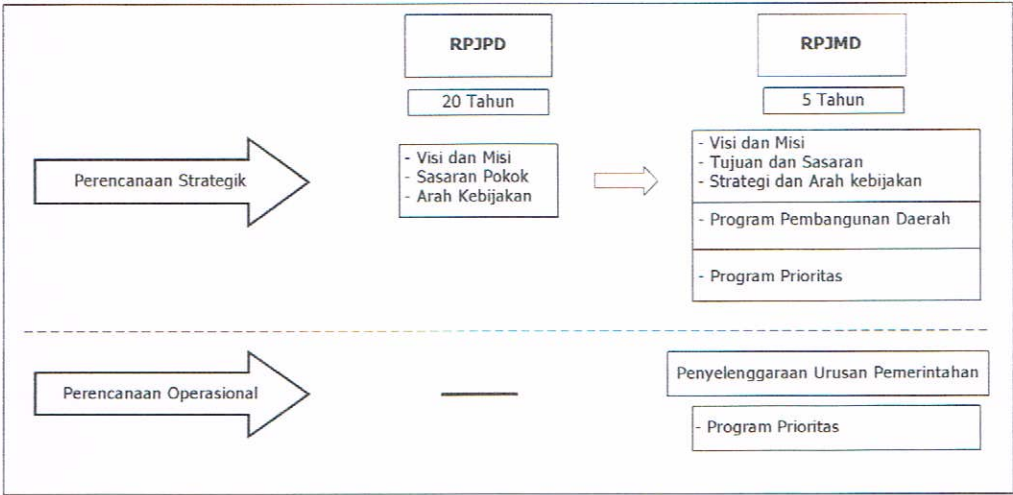
Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan strategik sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 6
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berkenaan dengan visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
MISI 1 : Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1: Mewujudkan pendidikan di semua jenjang pendidikan	Pemenuhan pendidikan pra sekolah	Meningkatkan pendidikan pra sekolah	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah
	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang berkualitas	Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan Wajib 9 tahun (sampai lulus)	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan
			Menggratiskan biaya pendidikan dasar.
			Penyediaan bantuan utk anak kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar.
			Meningkatkan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
		Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan non formal lainnya	Menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan pendidikan non formal lainnya
			Retrival, menjemput kembali anak sekolah yang drop out
	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Meningkatkan pemerataan Mutu Pendidikan dan kualitas pembelajaran.
			Meningkatkan minat tenaga pendidik dalam menulis
			Peningkatan akreditasi SD dan SLTP menjadi akreditasi A
	Meningkatkan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental dan muatan local
	Meningkatkanfasilitasi Pendidikan Menengah	Pemenuhan fasilitas pendidikan menengah	Penyediaan bantuan untuk anak kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan menengah.
Tujuan 2 : Mewujudkan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga	Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	Peningkatan Organisasi kepemudaan dan cabang olah raga

Tabel 31

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

MISI 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Memperkuat Kedaulatan Pangan	Terjaganya ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Mengembangkan ketersediaan pangan pada kondisi khusus
		Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan	Mengoptimalkan pendampingan distribusi pangan
			Meningkatkan aksesibilitas pangan
	Peningkatan diversifikasi pangan	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam dan berkualitas yang berbasis pangan lokal	Memanfaatkan pekarangan dan mengembangkan penganeekaragaman olahan pangan lokal
			Mengembangkan penganeekaragaman olahan pangan lokal
	Meningkatkan keamanan pangan segar	Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatkan pengawasan mutu dan standarisasi produk pertanian
			Meningkatkan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan
Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dengan Fokus Komoditas Unggulan dan andalan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan dan andalan pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi (padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) di kawasan sentra produksi/ agropolitan	Mencegah alih fungsi lahan
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan pasca panen
			Meningkatkan penyediaan bibit dan benih unggul, dan pengembangan logistik bibit dan benih
			Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
			Meningkatkan pemberdayaan UPT Pembibitan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dan penyakit zoonosis
			Meningkatkan kapasitas penyuluh dan peningkatan SDM petani dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi
			Meningkatkan penguatan kelembagaan petani
		Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum yang berkelanjutan	Menyediakan induk unggul dan benih ikan bermutu
			Meningkatkan pemberdayaan Balai Benih Ikan dan Unit Perbenihan Rakyat
			Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya
			Memfasilitasi peningkatan produksi unit pengolah pakan ikan mandiri, dan subsidi pakan ikan
			Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan/ agro industri	Meningkatkan sarana dan prasarana agroindustri
			Meningkatkan mutu, standardisasi, promosi, kemitraan, dan jaringan pasar produk
		Peningkatan Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah pada Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kemitraan
			Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
			Menyediakan lahan pengembangan pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
			Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata
		Peningkatan pemasaran kepariwisataan daerah yang sinergis	Mengembangkan kerjasama pemasaran pariwisata daerah yang sinergis antar stakeholder pariwisata dan antar kawasan
			Meningkatkan promosi pariwisata
			Mengembangkan festival/ even berbasis budaya dan atraksi
		Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Meningkatkan keragaman industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
			Meningkatkan kemitraan dan standardisasi usaha pariwisata
		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang berkarakter dan berjiwa entrepreneurship
		Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum yang berkelanjutan	Menyediakan induk unggul dan benih ikan bermutu
			Meningkatkan pemberdayaan Balai Benih Ikan dan Unit Perbenihan Rakyat
			Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya
			Memfasilitasi peningkatan produksi unit pengolah pakan ikan mandiri, dan subsidi pakan ikan
			Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan/ agro industry	Meningkatkan sarana dan prasarana agroindustri
			Meningkatkan mutu, standardisasi, promosi, kemitraan, dan jaringan pasar produk
Tujuan 3 : Mewujudkan	Meningkatkan daya saing pariwisata	Peningkatan Pembangunan dan	Meningkatkan pembangunan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Pembangunan Kepariwisataa n	daerah	pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah pada Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar	pengembangan Kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kemitraan
			Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
			Menyediakan lahan pengembangan pariwisata
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
			Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata
		Peningkatan pemasaran kepariwisataan daerah yang sinergis	Mengembangkan kerjasama pemasaran pariwisata daerah yang sinergis antar stakeholder pariwisata dan antar kawasan
			Meningkatkan promosi pariwisata
			Mengembangkan festival/ even berbasis budaya dan atraksi
		Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Meningkatkan keragaman industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
			Meningkatkan kemitraan dan standardisasi usaha pariwisata
		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang berkarakter dan berjiwa enterpreneurship
Tujuan 4 : Mewujudkan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produksi UMKM, IKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Nagari dan Ekonomi Kreatif yang mandiri dan profesional	Pemberian kemudahan formalisasi badan usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Melanjutkan pemberian izin gratis bagi usaha sektor informal yang tumbuh bai usaha mikro dan kecil
		Peningkatan produksi dan produktifitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing,	Meningkatkan pembinaan kelembagaan, manajemen dan diversifikasi produk

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		mandiri dan profesional	
			Meningkatkan fasilitasi penguatan permodalan bagi UMKM, IKM dan ekonomi kreatif
			Membangun dan mengembangkan tempat pemasaran Produk Unggulan Daerah di pintu masuk Kabupaten
			Memperluas dan meningkatkan akses pemasaran
			Revitalisasi pasar dan tradisional yang higienis dan tepat ukur
		Peningkatan standardisasi mutu dan sertifikasi produk	Meningkatkan nilai tambah PUD, peningkatan packaging, standardisasi, dan sertifikasi produk
		Pengembangan usaha melalui koperasi	Meningkatkan Pembinaan manajemen dan usaha koperasi
			Meningkatkan penumbuhan koperasi sektor riil
Tujuan 5 : Mewujudkan infrastruktur daerah terutama dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi	Meningkatkan infrastruktur dasar daerah	Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi dalam rangka konektivitas antar wilayah (pedesaan dan perkotaan)	Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi
			Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan dan tertinggal
		Meningkatkan fasilitasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan	meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan
	Meningkatkan infrastruktur penunjang ekonomi daerah	Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi
Tujuan 6 : Mendorong Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan realisasi investasi pada sektor pertanian dan pariwisata, serta sektor lainnya	Mendorong masuknya investasi di sektor pertanian dan pariwisata dengan memberikan kemudahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Meningkatkan promosi dan pengendalian pelaksanaan investasi
	Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai pasar tenaga kerja

Tabel 32
Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
MISI 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan Implementasi ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparat pemerintah daerah	Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Meningkatkan fungsi dan aktivitas mesjid	Peningkatan kegiatan keagamaan
	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Meningkatkan fungsi kelembagaan adat dan pemangku adat	Memperkuat kelembagaan KAN sebagai pendukung utama Nagari Adat

Tabel 33

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

MISI 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*go and clean governance*)

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat	Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	Peningkatan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel	Peningkatan pelaksanaan kinerja sesuai tugas dan fungsi
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
			Peningkatan Kapasitas fungsi legislatif
			Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan capil
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan
	Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Meningkatkan penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan pengembangan mutu dan pengelolaan kepegawaian
	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh aparatur yang profesional	Peningkatan mutu dan Pengelolaan kepegawaian untuk pemenuhan pelayanan prima	Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah berbasis akrual
			Peningkatan tertib administrasi keuangan
		Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah
			Menyusun regulasi dan penguatan implemementasi pengelolaan pendapatan daerah
			Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah
			Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah
	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan sarana penunjang pengawasan
			Penyusunan dan implementasi regulasi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif secara transparan dan akuntabel
	Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif	Peningkatan sistem perencanaan yang terpadu (dari nagari sampai Kabupaten)	Meningkatkan penguatan implementasi regulasi sistem perencanaan dan penganggaran
			Meningkatkan kapasitas aparatur perencana
	Meningkatkan pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai dan SDM yang profesional.	Menyusun Regulasi dan Penguatan Implementasi Sistem Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien
			Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Komunikasi dan Informatika
			membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
Tujuan 2 : Mewujudkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pangarustamaan gender dan hak-hak anak	Meningkatkan TRANSTIBMAS (Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat) dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan TRANSTIBMAS dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan TRANSTIBMAS
			Mendorong penyusunan dan implementasi regulasi Penyelenggaraan TRANSTIBMAS (Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat) dan perlindungan

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Masyarakat
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pengarusutamaan dan perlindungan perempuan dan anak
Tujuan 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemerintahan nagari dan kelembagaan nagari	Pelaksanaan fasilitasi	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan nagari
Tujuan 4 : Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Menjadikan Kabupaten Solok yang siaga bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

C. Pilar dan Prioritas Pembangunan

RPJMD merupakan dokumen strategis Kabupaten Solok untuk Tahun 2016-2021 yang mengimplementasikan janji-janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang disampaikan pada saat kampanye. Sebagaimana halnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ada beberapa substansi yang terkait erat dengan pencapaian visi dan misi yang juga dirumuskan dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi dan misi yang telah dijelaskan diatas disimpulkan dalam suatu kebijakan yang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan. Berikut empat pilar pembangunan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 34

Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan Tahunm 2016 - 2021

NO	PILAR PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	JANJI-JANJI BUPATI	PROGRAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Semua Jenjang Pendidikan	1 Membangun unit sekolah Baru pada semua jenjang pendidikan ~> SD 10 unit dan SLTP 5 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			2 Membangun ruang kelas baru pada semua jenjang pendidikan ~> SD 10 unit dan SLTP 6 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			3 Membangun mushola sekolah multifungsi ~> SD 10 unit dan SLTP 2 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			4 Mobiler da fasilitas lainnya ~> SD 10 unit dan SLTP 3 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			5 Membangun perpustakaan sekolah ~> SD 50 unit dan SLTP 20 unit	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			6 Tes potensi akademik bagi pelajar SMP ~> 20.000 orang siswa SLTP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
		2 Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan	1 Retrieval (menjemput anak sekolah yang drop out ~> SD 650 orang dan SLTP 100 orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

			2	Delay school (menjemput kembali anak sekolah yang tertunda melanjutkan pendidikan ~> SD 1.835 orang dan SLTP 415 orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			3	Proses sertifikasi guru sesuai kompetensi ~> 1.600 orang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
			4	Kabupaten Solok Menuhis	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
			5	Memberikan bantuan kepada tenaga pendidik untuk peningkatan kompetensi ~> 70 orang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
			6	5 besar setiap pekan olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2	Kesehatan	3	1	Peningkatan status RSUD jadi type B	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
			2	Menjadikan Puskesmas rawat inap ~> 11 Puskesmas	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
			3	Penyediaan mobil ambulance di Puskesmas terisolir ~> 6 unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

				4	Pembangunan Poskesri ~>74 unit	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
				5	Program BPJS bagi keluarga tidak mampu diluar program Nasional dan Provinsi ~> 40.000 orang	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
				6	Peningkatan SDM tenaga sukarelawan kesehatan ~> 300 orang	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		4	Pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat			
3	Ekonomi Kerakyatan	5	Pengembangan pariwisata, UMKM dan investasi dan sektor ekonomi lainnya	1	Gratis IMB, HO, SITU, TDP/TDI bagi UMKM ~>5.000 UMKM	Program penciptaan Ilm Usaha Kecil, Menengah yang kondusif
				2	Pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha ~> 5.000 orang	- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usha Mikro Kecil Menengah - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro dan Kecil
				3	Membangun tempat usaha unggulan daerah ~> 25 unit	Program Pengembangankewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
				4	Peningkatan SDM petani dalam menghadapi MEA	Program peningkatan kesejahteraan petani

		6	Penguatan kedaulatan pangan	1	Pembinaan Kelompok Tani ~> 370 Poktan	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan / peternakan
				2	Peningkatan SDM penyuluh pertanian	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan / peternakan
				3	Pengembangan komoditi unggulan pertanian	- Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan) - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Pengembangan Budaya Perikanan
		7	Peningkatan Infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi	1	Pembangunan Taman Hutan Kota	Program Pengembangan Perumahan
				2	Danau Diatas dan Danau Dibawah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
				3	Danau Singkarak	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
				4	Pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi desa, penyediaan sarana produksi dan alsintan	Program Peningkatan Produksi
		8	Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran	1	Pemberian Mikro Nagari ~> 6.896 orang	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
				2	Mendorong Pembentukan Bumhag ~> 74 Nagari	

4	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	9	Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh pemerintah nagari yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajarangan				
		1 0	Pelaksanaan reformasi birokrasi				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

D. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Penetapan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan dan beberapa program pembangunan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang dikelompokkan pada 5 (lima) misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 1

MISI 1: Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun									
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA 2016	2021	URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan pendidikan di semua jenjang pendidikan									
Mewujudkan Pembangunan 1 dan 2 :	Prioritas	1. Peningkatan Partispasi Masyarakat pada semua jenjang pendidikan 2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan							
1	Pemenuhan pendidikan pra sekolah	Meningkatkan pendidikan pra sekolah	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah	Program Pendidikan anak usia dini	APK PAUD	%	81,32	100	Pendidikan
2	Pemenuhan pendidikan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang berkualitas	Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan Wajar 9 tahun (sampai lulus)	Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun	APM SD/MI	%	94,99	100	Pendidikan
			Menggratiskan biaya pendidikan dasar.		APM SLTP	%	74,25	100	Pendidikan
			Penyediaan bantuan utk anak kurang mampu agar mengikuti pendidikan dasar.						

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA 2016	CAPAIAN KINERJA 2021	URUSAN
1				5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)						
		Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan pendidikan non formal lainnya	Menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan pendidikan non formal lainnya	Program Pendidikan Non Formal	APS SD/MI	%	0,25	0	Pendidikan
			<i>Retrival</i> , menjemput kembali anak sekolah yang <i>drop out</i>		APS SMP	%	0,015	0	Pendidikan
			<i>Delay school</i> , menjemput kembali anak sekolah yang tertunda melanjutkan pendidikan bagi tamatan SD/MI dan SLTP						
		meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah	Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Pengunjung	%	11,64	20	Perpustakaan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Peningkatan Sekolah yang menerapkan SPM pendidikan	Meningkatkan pemerataan Mutu Pendidikan dan kualitas pembelajaran.	Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan	Judul Buku	Jumlah	7.092	15.000	Perpustakaan
			Meningkatkan minat tenaga pendidik dalam menulis	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Kualifikasi SD SMP	%	91,44 90,85	100 100	Pendidikan
			Peningkatan akreditasi SD dan SLTP menjadi akreditasi A		Persentase Minat Menulis	%	10	65	Pendidikan
			Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental		Akreditasi Sekolah SD/MI SMP/MTS	Jumlah	69,86 65	85 80	Pendidikan
4	Meningkatkan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental sesuai ABS-SBK	Penyusunan kurikulum pendidikan karakter dan revolusi mental dan muatan lokal	Program Wajib belajar 9 Tahun	Mata Pelajaran	Paket	1	0	
5.	Meningkatkan fasilitasi Pendidikan Menengah	Pemenuhan fasilitasi pendidikan menengah	Penyediaan bantuan untuk anak kurang mampu	Program Pendidikan Menengah	% siswa miskin dan/atau berprestasi yang terbantu	%	20	80	Pendidikan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			agar mengikuti pendidikan menengah.	Program Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	buah	8	6	Pendidikan

Tujuan 2 : Mewujudkan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga

1.	Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga	Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga	Peningkatan Organisasi kepemudaan dan cabang olah raga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan	Jumlah	75	75	Pendidikan
					Pelatihan kepemimpinan	buha	35	35	Pendidikan
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prestasi Olah raga	Peringkat	5	5	Pendidikan

Tabel 36

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 2

MISI 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	2016	2021	10
Tujuan 1 : Mewujudkan Taraf Kesehatan Dan Kualitas Hidup Masyarakat									
Mewujudkan Program		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
Prioritas ke 3 :									
P1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta upaya pencegahan dan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pelayanan Puskesmas dan fasilitas ambulance 24 jam	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	Angka	246/1000	225/10000	Kesehatan
					Angka kematian bayi	angka	35/1000	28/1000	
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi dan tersertifikasi	Unit	4	19
					RSUD tersertifikasi terakreditasi nasional	buah	1	1	
				Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana	Jumlah Puskesmas rawat inap	Unit	8	18	Kesehatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	2016	2021	10
				dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					
				Program Obat dan Pembekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	100	100	Kesehatan
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	%	13,23	13,18	Kesehatan
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun)	%	42,51	34	
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase pelayanan lansia	%	100	100	Kesehatan
			Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Prevalensi tuberkulosis (TBC)	%	100	100	Kesehatan
					Jumlah penderita HIV/AIDS	orang	27	17	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1									10
					Persentase jorong UCI	%	95	95	
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase darah tinggi	%	100	100	Kesehatan
					Persentase obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	%	5,63	5,52	
					Aturan tentang kawasan tanpa rokok	Perda	-	-	
				Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan promosi kesehatan	%	100	100	Kesehatan
		Peningkatan pelayanan yang luas untuk rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Kemitraan	%	100	100	Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	%	44,47	100	Kesehatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	2016	2021	10
				Penduduk Miskin	masyarakat miskin				
		Peningkatan standar pelayanan rumah sakit	Meningkatkan sarana dan parasarana serta manajemen rumah sakit	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sapra RS Akreditasi	% Nilai	60 C	80 B	Kesehatan
2.	Meningkatkan Kesadaran individu, keluarga dan masyarakat dalam penyehatan lingkungan								Kesehatan
3.	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	%	70,50	71	Pengendalian Penduduk dan KB
		Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% PIK - KRR	%	100	100	Pengendalian Penduduk dan KB

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Usia Perkawinan	Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB	Pelaksanaan Konseling	%	100	100	Pengendalian Penduduk dan KB
		Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR mandiri	Partispasi masyarakat	%	100	100	Pengendalian Penduduk dan KB
				Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping	orang	414	414	Pengendalian Penduduk dan KB
4.	Meningkatnya Penangkulangan PMKS	Meningkatkan Pemberian pelayanan social bagi PMKS	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan social, jaminan social dan perlindungan social	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan perlindungan	orang	145.023	145.023	Sosial
					Persentase jumlah lansia dan anak cacat yang diberi bantuan	Orang	132	132	Sosial
				Program Pembinaan Anak terlanter	Persentase anak, orang dan mayat terlanter	%	100	100	Sosial

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	2016	2021	10
				Program pemberdayaan fakir miskin	yang ditangani				
					Jumlah penerima raskin	orang	22.828	22.828	Sosial
					Jumlah Peningkatan Bimbingan Sosial bagi penerima KUBE	Kube	50	88	Sosial
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase peningkatan masalah2 strategis	%	100	100	Sosial
				Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM penerima bantuan	Orang	3600	3600	Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan SDM potensi lembaga kesejahteraan sosial	Orang	250	487	Sosial
				Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS					
Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang lestari									
Mewujudkan Program Prioritas ke 4 :		Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Hidup							

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis tata ruang	Peningkatan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam	meningkatkan Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang diawasi	%	30	42.5	Lingkungan Hidup
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	Jumlah konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	lokasi	1	2	Lingkungan Hidup
			Mengurangi Kerusakan Kawasan Hutan	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Tingkat Kerusakan Hutan	%	6.1	NA	Kehutanan
			Mengurangi Lahan Kritis di dalam dan diluar kawasan hutan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	125	NA	Kehutanan
			Melindungi Kawasan Hutan dan Memberdayakan KPHL	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Perlindungan Hutan	%	10	NA	Kehutanan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	2016	2021	10
		Peningkatkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Mewujudkan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang seluruh wilayah	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	Dokumen	1	2	Pekerjaan Umum dan tata ruang dan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Program Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau	Jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia dan terpelihara	ha	1	61	Pekerjaan Umum dan tata ruang
				Program pengendalian pemanfaatan ruang	persentase kepatuhan terhadap tata ruang	%	40	100	Pekerjaan Umum dan tata ruang
Tujuan 3 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak									
Mewujudkan Program Prioritas ke 4 :		Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Hidup							
1	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang	Peningkatan pencapaian universal akses	Meningkatkan upaya penangganan kawasan kumuh	Program Lingkungan Sehat Perumahan	jumlah kawasan kumuh tertangani	Kawasan	0	10	Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	layak	100-0-100 dan	secara terpadu				8	9	10
			meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) kawasan perumahan dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak	Program Lingkungan Sehat	Jumlah Kawasan perumahan dan permukiman yang tertata	Kawasan	0	1	Perumahan dan permukiman
					Persentase Penyediaan LPU	%	3,80	4,47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan dan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi MBR	Program Pengembangan Perumahan	jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	131	400	Perumahan dan permukiman

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah infrastruktur pedesaan yang terbangun	Paket	2	36	Pekerjaan Umum dan tata Ruang
			Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak	Program, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan RT yang memiliki akses layanan air bersih	RT	49.022	55.902	Perumahan dan Pemukiman
			Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	Program, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan RT yang memiliki akses layanan air limbah	RT	49.022	53.035	Perumahan dan Pemukiman
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang tertangani	M3/hari	45	125	Lingkungan Hidup

Tabel

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 3

Misi 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Memperkuat Kedaualatan Pangan									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 6		Penguatan Kedaualatan Pangan							
1	Terjaganya ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Mengembangkan ketersediaan pangan pada kondisi khusus	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Penurunan jumlah Penduduk rawan pangan	(%/ tahun)	1	6	Pangan
		Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan	Mengoptimalkan pendampingan distribusi pangan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Stabilitas harga dan pasokan pangan pokok (HPP) di tingkat produsen dan konsumen	%	80	100	Pangan
			Meningkatkan aksesibilitas pangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Fluktuasi harga di tingkat konsumen (Coefisien Variasi /CV)	%	<10	<10	Perdagangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam dan berkualitas yang berbasis pangan lokal	Memanfaatkan pekarangan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Model pengembangan	Kelompok	19	24	Pangan
			Mengembangkan pengane karagaman olahan pangan local	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ nagari	Cakupan kelompok dasawisma yang dbina	%	12,5	75	Pemberdayaan masyarakat dan desa
3	Meningkatkan keamanan pangan segar	Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatkan pengawasan mutu dan standardisasi produk pertanian	Program peningkatan Kesejahteraan petani	Jumlah kelompok tani yang menerapkan standardisasi produk	Kelompok	17	71	pertanian
			Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, dan pangan olahan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Bahan pangan beredar yang aman dikonsumsi	%	87	100	Pangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dengan Fokus Komoditas Unggulan									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 6		Penguatan Kedaulatan Pangan							
2	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	Peningkatan produksi, dan produktifitas komoditas unggulan dan andalan pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi (padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) di kawasan sentra produksi/ agropolitan	Mencegah alih fungsi lahan	Program peningkatan produksi (pertanian/ perkebunan)	Produktifitas padi	(ton/ha)	5,72	6,07	Pangan
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan pasca panen		Produksi Pertanian				
			Meningkatkan penyediaan bibit dan benih unggul, dan pengembangan logistik bibit dan benih		- Padi	ton	346.578,01	401.778,90	Pangan
			Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman		- Palawija	ton	1.868,50	2.899,20	Pertanian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1					6	7	8	9	10
					- Sayuran	ton	134.535,9 8	171.70 5,78	Pertanian
					- Bua-buahan	ton	127.611,2 3	147.08 3,88	Pertanian
					- Produk Perkebunan	ton	1.246,96	1.444, 54	Pertanian
					Cakupan penggunaan benih unggul padi sawah bersertifikat	%	51,26	65,43	Pangan
					Cakupan kelompok tani penerima bantuan alat dan mesin pertanian	%	5	33	Pangan
					Cakupan kelompok tani penerima pupuk bersubsidi	kelompok	1.303	1.403	Pangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6 Penambahan cakupan areal sawah beririgasi melalui pengembangan/ rehabilitasi/pem bangunan sarana dan prasarana sumber air	7 hektar	8 500	9 3.000	10 Pangan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas benih dan bibit	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi ternak :	ekor	3.399.561	3.578.318	Pertanian
			Meningkatkan pemberdayaan UPT pembibitan		Cakupan kelompok tani penerima bantuan ternak/bibit	%	17	100	Pertanian
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pengendalian kasus penyakit ternak	%	71,50	91,60	Pertanian
			Meningkatkan kapasitas penyuluh dan peningkatan	Program pemberdayaan penyuluhan	Jumlah kelembagaan petani yang	Unit	116	1.632	Pangan, Pertanian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1			4	5	6	7	8	9	10
			SDM petani dan pemanfaatan industry dan teknologi		meningkat kapasitasnya				
			Meningkatkan penguatan kelembagaan petani		Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Unit	4	14	Pangan, Pertanian
			Peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan Umum yang berkelanjutan		Program pengembangan budidaya perikanan	Ton	1.680,91	2.506,11	Pangan, Perikanan
			Meningkatkan unguil dan benih ikan bermutu		Produksi perikanan budidaya				
			Meningkatkan pemberdayaan Balai Benih Ikan dan Pembenihan Rakyat						
			Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya						
			Memfasilitasi peningkatan produksi Unit						
			Pengolahan pakan ikan mandiri dan subsidi pakan ikan						

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan perairan umum	Ton	447	3.607,7	Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan/agro industri	Meningkatkan sarana dan prasarana agro industry	Program peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan kelompok usaha agribisnis yang dikembangkan	Kelompok	139	165	Pertanian
			Meningkatkan mutu, standarisasi, promosi, kemitraan dan jaringan pasar produk		Sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil	Unit	-	1	Pertanian
5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan investasi serta Sektor Ekonomi lainnya									
8. Pengembangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran									
1	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Peningkatan Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata daerah pada kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan Danau Singkarak, Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) dan Kawasan Danau Kembar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,	Program pengembangan destinasi pariwisata	Cakupan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas kepariwisataan di kawasan wisata	%	3,4	75,6	Pariwisata

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN												
							2016	2021													
1		3	4	5	6	7	8	9	10												
			Pemerintah Kabupaten, dan kemitraan																		
			Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata																		
			Menyediakan lahan pengembangan pariwisata																		
			Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat		Taman Hutan Kota Terpadu (THKT)	%	0	100													
										-	Kawasan Danau Kembar	%	27	70							
																-	Kawasan Danau Singkarak	%	17	60	
			Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata	Program pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan BCB yang dilestarikan	unit	1	6	Kebudayaan												

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3 Peningkatan pemasaran kepariwisataan daerah yang sinergis	4 Mengembangkan kerjasama pemasaran parwisata daerah yang sinergis antar stakeholder parwisata dan antar kawasan	5 Program pengembangan pemasaran parwisata	6 Jumlah pelaksanaan misi penjualan (Sales Mission)	7 Kegiatan	8 2	9 12	10 Pariwisata
			Meningkatkan promosi parwisata						
			Mengembangkan festival/even berbasis budaya dan atraksi						
		Peningkatan pembangunan dan pengembangan industry parwisata dan ekonomi kreatif daerah	Meningkatkan keragaman industri parwisata dan ekonomi kreatif daerah	Program pengembangan kemitraan	Jumlah perkembangan jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan				Pariwisata
					Jumlah pendudukan even peningkatan Konvensi, Insentive, Even dan Minat Khusus	Kegiatan	5	30	Pariwisata
					Jumlah penyelenggaraa n even seni, budaya dan parwisata daerah	Kegiatan	3	18	Pariwisata

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
					- Penginapan Tipe Melati	unit	5	8	
					- Hotel Tipe Melati	unit	1	2	
					- Hotel Berbintang	unit	-	2	
					Jumlah perkembangan jenis, kelas dan jumlah restoran				
					- Tipe A	unit	1	2	
					- Tipe B	unit	3	5	
					- Tipe C	unit	85	95	
					Pertumbuhan usaha pariwisata	%	2	12	
		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang berkarakter dan berjiwa entrepreneurship	Program pengembangan kemitraan	Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata	Naskah	0	5	Pariwisata
					Cakupan peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata	kelompok	2	17	Pariwisata

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 4 : Mewujudkan Produktivitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 5 dan 8		5. Pengembangan Pariwisata, Usaha Mikro, UMKM dan Investasi dan sector ekonomi lainnya							
8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran									
1	Meningkatkan Produksi UMKM, IKM, Koperasi dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, mandiri dan profesional	Pemberian kemudahan formalisasi badan usaha (Usaha mikro, Kecil, dan Menengah)	Melanjutkan pemberian izin gratis bagi usaha sektor informal yang tumbuh bagi Usaha Mikro dan Kecil	Program penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif	Persentase peningkatan formalisasi Usaha Mikro dan Kecil	%	8	48	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan industri
		Peningkatan produksi dan produktifitas koperasi, usaha mikro, kecil, dan Menengah yang mandiri dan profesional	Meningkatkan pembinaan kelembagaan, manajemen, dan diversifikasi produk	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	10	60	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Cakupan bina kelompok industri makanan dan minuman	%	3	18	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatkan Fasilitas penguatan permodalan bagi UMKM, IKM dan ekonomi kreatif		Cakupan fasilitas permodalan untuk usaha UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	%	1,38	21,38	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Membangun dan mengembangkan tempat pemasaran Produk Unggulan Daerah di pintu masuk Kabupaten		Persentase peningkatan pengembangan infrastruktur pemasaran produk UMKM	%	25	100	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Memperluas dan Meningkatkan akses pemasaran	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah MoU dan atau ikatan dagang yang ditandatangani	dokumen MoU/ikatan dagang	2	12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Revitilisasi pasar tradisional yang higienis dan tepat ukur	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional yang higienis dan tepat ukur	unit	5	20	Perdagangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Pembangunan dan operasionalisasi UPT kemetrologian	%	0	100		Industri
					Cakupan penerima pengembangan sarana pengolahan dan pengemasan Usaha kecil dan menengah	%	16	100		
					Persentase Koperasi Aktif	%	56,85	80		
Tujuan 5 : Mewujudkan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi										
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 7					Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi					

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1				perhubungan	% pelayanan angkutan	%	50	80	Perhubungan
				Program peningkatan pelayanan angkutan					
				Program Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah perbatasan dan tertinggal					
2	Meningkatkan penunjang ekonomi daerah	Meningkatkan fasilitas penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan	meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah Jorong yang teraliri listrik	Jorong	407	414	Energi dan sumber daya mineral
				Program Pembangunan infrastruktur penunjang sektor Pertanian					
				Meningkatkan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi					
		Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat		jalan usaha tani	km		3	25	Pangan
				Jalan usaha produksi					
							3	20	Pertanian

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas areal irigasi yang ber kondisi baik	ha	17.875	29.375	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pangan
				Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah rehabilitasi sungai	unit	2	2	Pekerjaan umum dan penataan ruang
					Jumlah rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya	unit	2	2	
				Program pembangunan infrastruktur penunjang wisata	Infrastruktur wisata	Paket	1	10	Parwisata
				Program Memfasilitasi pengelolaan sumber energi pemanfaatan langsung	Jumlah Nagari terfasilitasi pengelolaan sumber energi pemanfaatan langsung	Nagari	0	5	Energi dan sumber daya mineral

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5 Program pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Program Penertiban dan Pengawasan SPBU, BBM dan Gas	6 Jumlah kegiatan pertambangan yang terawasi Jumlah Pengawasan SPBU, Depot Lokal dan Kios Pengencer	7 IUP Unit	8 63	9	10 ESDM ESDM
Tujuan 6 : Mendorong Peningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 5 dan 8					5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sector ekonomi lainnya				
					8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran				
1	Meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan realisasi investasi pada sektor pertanian dan pariwisata, serta sektor lainnya	Mendorong masuknya investasi di sektor pertanian dan pariwisata dengan memberikan kemudahan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai investasi pariwisata	Juta rupiah	5	150	Penanaman Modal
			Meningkatkan promosi dan pengendalian pelaksanaan investasi		Jumlah Nilai investasi pertanian	Juta rupiah	5	110	
					Jumlah investor	investor	2	15	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	6 Kesiapan sarana dan prasarana BLK menuju akreditasi	7 %	8 0	9 100	10 Tenaga Kerja
					Jumlah lulusan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0	150	
					Jumlah lulusan pemagangan	Orang	0	25	
					Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Orang	0	50	
					Jumlah pelaksanaan bursa kerja	kali	0	0	
	Perluasan kesempatan kerja		Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai pasar tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang di tempatkan	%	0	10	Tenaga Kerja
					calon wirausaha yang mengikuti inkubasi bisnis	Usaha	1	3	
					Jumlah perusahaan yang menerapkan	Perusahaan	0	10	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6 keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	7	8	9	10

Tabel

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 4

Misi 4 : Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mengimplementasikan ABS-SBK ditengah-tengah masyarakat dan aparaturn pemerintah daerah									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 9		Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh pemerintah nagari yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajaringan							
1	Meningkatkan implementasi masyarakat yang madani, berbudaya serta berkarakter sesuai dengan ABS-SBK	Meningkatkan fungsi dan aktivitas mesjid	Peningkatan kegiatan keagamaan	Program Pengembangan nilai-nilai agama dan kebudayaan	% Mesjid Aktif	%	10	100	Pemerintahan Umum dan pelayanan publik
					% Mesjid Paripurna	%	30	100	Pemerintahan Umum dan pelayanan publik
2	Penguatan kelembagaan adat dan pemangku adat	Meningkatkan fungsi kelembagaan adat dan pemangku adat	Memperkuat kelembagaan KAN sebagai pendukung utama Nagari Adat	Program Pengembangan Nilai budaya	Penguatan Pelayanan	%	30	100	Pemerintahan Umum dan pelayanan publik

Tabel
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Misi 5

Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10									
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
1.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten	Peningkatan pelayanan yang mudah, transparan dan akuntabel	Peningkatan pelaksanaan kinerja sesuai tugas dan fungsi	Program Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan fungsi	Persentase Pelayanan	%	100	100	Non Urusan
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum	% Pelayanan Pemerintahan Umum	%			Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	% Fasilitasi Kedinasan	%			Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1									
			Peningkatan Kapasitas fungsi legislatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	% Peningkatan Kapasitas trifungsi DPRD	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan capil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	% Penataan Adm Capil	%	83	100	Adm Kependudukan dan capil
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Program Penyelamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	% Arsip yang diselamatkan	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
		Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasana pemerintahan	Meningkatkan penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasana pemerintahan	Program Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasana pemerintahan	Jumlah SKPD yang ditingkatkan sapra	unit	2	12	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang profesional	Peningkatan mutu dan Pengelolaan kepegawaian untuk pemenuhan pelayanan prima	Meningkatkan pengembangan mutu dan pengelolaan kepegawaian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	%	30	80	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% Penggunaan IT	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
3.	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh aparatur yang profesional	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah berbasis akrual	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Pengelolaan Keuangan yang baik	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Peningkatan tertib administrasi keuangan						
			Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah						
			Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi dan penguatan implementasi pengelolaan pendapatan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
			Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah						Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1			meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengeluaran pendapatan daerah						Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
4	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dan sarana penunjang pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APJP yang mengikuti Diklat	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Penyusunan dan implementasi regulasi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif secara transparan dan akuntabel	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Audit	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan pengawasan	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kebijakan KDH					
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% Penataan Peraturan Per UU	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	% Kerjasama Pemerintah daerah	%	80	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan daerah	% perencanaan yang baik	%	100	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
5	Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif	Peningkatan sistem perencanaan yang terpadu (dari nagari sampai Kabupaten)	Meningkatkan penguatan implementasi regulasi sistem perencanaan dan penganggaran	Program Perencanaan Pembangunan daerah	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan social dan budaya	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
				Program Perencanaan Pembangunan infrastruktur	% koordinasi	%	70	100	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan	% yang mengikuti diklat perencanaan	%	30	80	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
6	Meningkatkan pembangunan e-government yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai dan SDM yang profesional.	Menyusun Regulasi dan Penguatan Implementasi Sistem Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	% pengembangan komunikasi	%	20	75	Komunikasi dan informatika
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	% optimalisasi teknologi	%	30	70	Komunikasi dan informatika

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Komunikasi dan Informatika	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	% Peningkatan SDM	%	20	60	Komunikasi dan informatika
			membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	% Pengembangan komunikasi	%	20	80	Komunikasi dan informatika
Tujuan 2 : Mewujudkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pangrustamaan gender dan hak-hak anak									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
1.	Meningkatkan TRANSTIBMAS (Ketertiban umum dan ketentrman Masyarakat)dan Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan TRANTBIMAS dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan TRANTBIMAS	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	%	100	100	Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
					Jumlah perda yang ditegakan	Jumlah	5	10	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1				Program Pemeliharaan kantrabtbimas dan pencegahan tindak criminal	% Pemeliharaan kantrabtbimas	%	100	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Program Pengembangan wawasan kebangsaan	% Pengembangan wawasan kebangsaan	%	60	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah partai politik yang dibina	Jumlah	1	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			Mendorong penyusunan dan implementasi regulasi Penyelenggaraan TRANTIBMAS (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
							2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pengarusstamaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan serta anak	Penyelesaian kasus KDRT	Kasus	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusstamaan Gender dan Anak	% Peraturan yang ditegakan	%	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	% Partispasi Perempuan dalam pembangunan	%	30	50	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari									
Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
1.	Meningkatkan fasilitas terhadap pemerintahan nagari dan	Pelaksanaan fasilitas	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan	Program Peningkatan SDM dan kelembagaan nagari	% aparat nagari yang mengikuti diklat	%	50	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kelembagaan nagari		nagari						
					% Organisasi pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan	%	40	100	
					% pengembangan lembaga ekonomi nagari	%	35	100	
				Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	% Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	30	75	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan 4 : Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Mewujudkan Prioritas Pembangunan ke 10									
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
1.	Menjadikan Kabupaten Solok yang siaga bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana	Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Peningkatan ketahanan daerah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Level	2	3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

BAB III

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan

KODE	PROGRAM	KODE	KEGIATAN
1	2	3	4
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan			
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		25	Pelayanan Administrasi Perkantoran
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
		45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Aparatur
		47	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
		09	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16	Program Kerjasama Pembangunan		
		04	Koordinasi dalam pemecahan masalah - masalah daerah
20	Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		

1	2	3	4
		02	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
		01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik
		05	Penyusunan Rancangan RPJMD
		08	Penyusunan Rancangan RKPD
		09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
		13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
		01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
		04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya		
		03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
	Urusan Wajib Statistik		
15	Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah		
		01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
	Urusan Wajib Penataan Ruang		
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang

2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Target dan Realisasi			Alokasi dan Realisasi Anggaran					SKPD Pelaksana	Keterangan
		Target	Realisasi	%	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	4 org	4 org	100	DAU	13.023.700	12.684.900	97.40	Barenitibang		
2	Program Kerjasama Pembangunan										
	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	24 kali/ 4 Dok	24 kali/ 4 Dok	100	DAU	955.300.000	944.255.408	98.84	Barenitibang		
3	Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	48 berita	48 berita	100	DAU	58.000.000	57.927.950	99.88	Barenitibang		
	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	42 org	42 org	100	DAU	127.266.115	127.207.250	99.95	Barenitibang		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
4	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	74 nagari 14 kec.	74 nagari 14 kec.	100	DAU	94.282.550	94.282.550	100.00	Barenitibang		
	Penyusunan Rancangan RPJMD	1 dok	1 dok	100	DAU	366.162.800	365.162.800	99.73	Barenitibang		
	Penyusunan rancangan RKPD	6 dok	6 dok	100	DAU	650.769.650	636.262.948	97.77	Barenitibang		

	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 x Musrenbang 1x Forum SKPD	1 x Musrenbang 1x Forum SKPD	100	DAU	133.577.200	133.577.200	100.00	Barenilitbang	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 Lap	1 Lap	100	DAU	87.000.000	86.151.350	99.02	Barenilitbang	
5	Program Perencanaan pembangunan ekonomi									
	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	3 Dok	3 Dok	100	DAU	395.750.000	387.213.400	97.84	Barenilitbang	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	24 kali/ 3 Tahun 5 kali 1 Dok	24 kali/ 3 Tahun 5 kali 1 Dok	100	DAU	540.050.000	539.679.200	99,93	Barenilitbang	
6	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya									
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	24 kali/ 2 Dok	24 kali/ 2 Dok	100	DAU	926.929.200	908.302.749	97.99	Barenilitbang	
	URUSAN WAJIB STATISTIK									
7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah									
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	3 Dok	3 Dok	100	DAU	230.000.000	211.565.699	91.99	Barenilitbang	
	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG									
8	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 dok	1 dok	100	DAU	151.000.000	146.328.150	96.91	Barenilitbang	
						4.729.111.215	4.650.601.554	98.34		

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabatan struktural dan fungsional

No	Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan					Pangkat dan Golongan					Struktural	Fungsional	Ket
		S2/S3	S.1	D.III/D.II/DI	SMA	SMP/SD	IV	III	II	I				
1	40	10	27	-	3	-	5	32	3	-		13	4	

3.a Jumlah Pegawai pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

No	Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan					Pangkat dan Golongan					Struktural	Fungsional	Ket
		S2/S3	S.1	D.III/D.II/DI	SMA	SMP/SD	IV	III	II	I				
1	26	6	18	-	2	-	2	22	2	-		9	2	

3.b Jumlah Pegawai pada Urusan Wajib Statistik

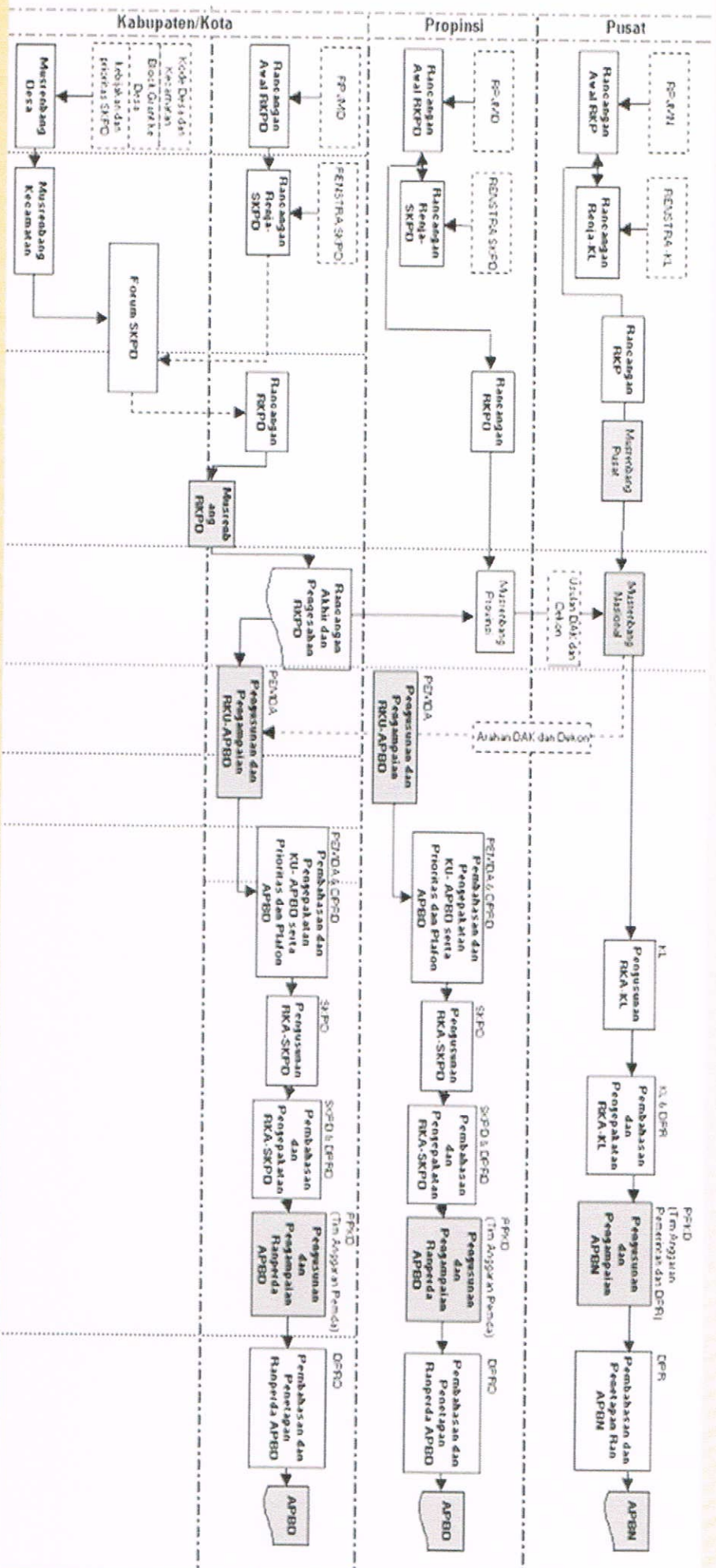
No	Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan					Pangkat dan Golongan					Struktural	Fungsional	Ket
		S2/S3	S.1	D.III/D.II/DI	SMA	SMP/SD	IV	III	II	I				
1	7	1	6	-	-	-	1	6	-	-		1	-	

3.c Jumlah Pegawai pada Urusan Penataan Ruang

No	Jumlah Pegawai	Klasifikasi Pendidikan					Pangkat dan Golongan					Struktural	Fungsional	Ket
		S2/S3	S.1	D.III/D.II/DI	SMA	SMP/SD	IV	III	II	I				
1	7	3	3	-	1	-	2	4	1	-		3	2	

4. Proses Perencanaan RPJMD/RKPD/MUSREMBANG/RKA

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Sumber : Perda No 4 Tahun 2006

5. Kondisi Asset Yang dikuasai SKPD

No	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Registser	MerktType	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp) (000)	Ket.
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
		b Alat-alat Angkutan													
1	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	000	INOVA / Mini Bus	-1998	Besi	2006	-	MHFW8EM4G 2318543	1TR- A184448	BA 1589 H	M0572056 7	APBD	289,120	Ops Kepala
2	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	0001	INOVA / Mini Bus	-1998	Besi	2006	-	MHFXM42G77 2085162	1TR- 6356609	BA14H	3135565	APBD	174,800	Ops Kepala
3	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	0002	Isuzu Panther	-2499	Besi	2006	-	MHCTBR54F6 K277177	E277177	BA106H	-9895055	APBD	139,950	Ops Sekretaris
4	02.03.01.02.03	Kendaraan Roda 4	0003	Kijang Super	-1486	Besi	1993	-	MHF21KF4001 140728	5K-9180953	BA133 H	1196602c	APBD	15,000	RB
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Honda CS - 1 2a 1 RR	-125	Besi	2008	-	MH1JBA1198K 063864	JBA1E- 1063807	BA 6606 HE	4013616c	APBD	19,895	Yondrizo Zuspa
6	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0002	GL 160 D CW	160	Besi	2008	-	Mh1Kc12138K1 45085	KC12E- 1145126	BA 6581 HE	4611115c	WISMP	16,335	Hanafi
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0014	Honda	-	Besi	1984	-	KAE-1002544	KB.009- 08520	BA 4171 HE	6199671c	APBD	1,750	RB
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0015	Honda W/N MCB 97 cc	125	Besi	1996	-	-	-	BA 9956 H	-	APBD	4,500	RB
9	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0016	GL Max	125	Besi	1996	-	MH1UABCO1T K016398	UABE- 1016213	BA 7871HQ	4966880C	APBD	5,500	RB
10	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0017	Astrea Supra	-	Besi	2001	-	KEYV4E.118636	MHIKEV413 1K184988	BA 7508 H	No.039642 8	APBD	6,000	Armon Sola
11	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0018	GL Proll	100	Besi	1998	-	WAE.1025697	MHIW/A000 SSK25650	BA7570 AQ	Ano.33276 10C	APBD	6,700	Mindun Simanjuntak
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0019	GL Max	115	Besi	1991	-	ED00100071	EDE- 1000062	BA 6634 H	9686692C	APBD	5,500	Indra
13	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0022	GL Max	125	Besi	1986	-	MH1DE000P2 K023497 R	DEE 1023366	BA7644 H	-	APBD	19,895	Diserahkan ke Bid. Aset
14	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0024	Honda CB	125	Besi	1985	-	KB008-07680	JL03E- 5189063	-	-	APBD	5,500	Diserahkan ke Bid. Aset
														710,445,000	
1		e Alat-alat Kantor dan RT													
2	02.06.02.04.02	AC Nasional	001	Nasional	-	-	2002	-	-	-	-	-	APBD	2,880,000	
3	02.06.02.01.01	Almari Buku	001	-	-	-	2001	-	-	-	-	-	APBD	2,700,000	

4	02.04.03.01.51	Antena Parabola	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,250,000	
5	02.06.02.06.39	Dispenser	006	Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
6	02.06.02.06.39	Dispenser Nasional	001	Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	750,000	
7	02.06.02.06.28	Gambar Burung Garuda	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
8	02.06.02.06.29	Gambar Danau Singkarak	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
9	02.06.02.06.29	Gambar Gubernur	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
10	02.06.02.06.29	Gambar Kawasan TNKS	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
11	02.06.02.06.29	Gambar Presiden	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
12	02.06.02.06.29	Gambar Bupati / Wabub	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
13	02.06.02.06.29	Gambar Wapres	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	36,000	
14	02.06.03.01.02	Komputer Pentium -4	001	Pentium 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,700,000	
15	02.06.03.01.02	Komputer Pentium -4	001	Pentium 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5,400,000	
16	02.06.03.01.02	Komputer Pentium -4	001	Pentium 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5,400,000	
17	02.06.03.01.02	Komputer Pentium -4	001	Pentium 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,150,000	
18	02.06.03.01.02	Komputer Pentium -4	001	Pentium 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,150,000	
19	02.06.03.01.02	Komputer SIPNAS P-4	001	SIPNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,150,000	
20	02.06.02.01.30	Kursi Putar Besar	001	Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	270,000	
21	02.06.02.01.30	Kursi Putar Besar	001	Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	270,000	
22	02.06.02.01.30	Kursi Putar Besar	001	Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	270,000	
23	02.06.02.01.30	Kursi Putar Besar	001	Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	270,000	
24	02.06.02.01.30	Kursi Putar Besar	001	Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	270,000	
25	02.06.02.01.30	Kursi Putar Besar	001	Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	270,000	
26	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
27	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,700,000	

28	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
29	02.06.03.02.02	Laptop Pentium – 4	001	Pentium	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	102,600,000	
30	02.06.03.02.02	Laptop Pentium – 4	001	Pentium	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	17,100,000	
31	02.06.04.07.06	Lemari Arsip File	001	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,250,000	
32	02.06.02.01.01	Lemari Batas	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4,050,000	
33	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,070,000	
34	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	10,350,000	
35	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	10,350,000	
36	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6,210,000	
37	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,070,000	
38	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,070,000	
39	02.06.02.01.01	Lemari Buku	001	-	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4,140,000	
40	02.06.02.01.01	Lemari Pembatas	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	675,000	
41	02.06.02.01.01	Lemari Pembatas	001	-	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	675,000	
42	02.06.02.01.01	Lemari Pembatas	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	675,000	
43	02.06.02.01.01	Lemari Peta	001	-	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	675,000	
44	02.06.01.05.31	Master Plan	001	-	-	-	-	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,475,000	
45	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	001	1/2 Biro	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
46	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	001	1/2 Biro	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
47	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	001	1/2 Biro	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
48	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	001	1/2 Biro	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
49	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	001	1/2 Biro	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
50	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
51	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	

52	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
53	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
54	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
55	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
56	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
57	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
58	02.06.04.01.06	Meja Biro	001	Biro	-	-	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
59	02.06.02.01.48	Meja File	001	-	-	-	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	720,000	
60	02.06.02.01.37	Meja Komputer	001	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	315,000	
61	02.06.02.01.27	Meja Rapat	001	-	-	-	1992	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	900,000	
62	02.06.02.01.27	Meja Sidang	001	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,330,000	
63	02.06.02.01.13	Meja Telephone	001	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
64	02.06.02.01.13	Meja Telephone	001	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	900,000	
65	02.06.02.01.13	Meja Telepon	001	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
66	02.06.02.01.13	Meja Telepon	001	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450,000	
67	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	001	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	225,000	
68	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	001	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,575,000	
69	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	001	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	225,000	
70	02.06.01.05.06	Papan Struktur Bappeda	001	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,620,000	
71	02.06.02.06.50	Pembatas Ruang Rotan	001	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	405,000	
72	02.06.02.01.02	Rak-rak Buku	001	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,125,000	
73	02.06.03.05.04	Scanner	001	-	-	-	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
74	02.07.02.01.07	Speaker	001-004	Aktif	-	-	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,350,000	
75	02.06.01.05.07	Visi Bappeda	001	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	675,000	

76	02.06.01.05.07	Misi Bappeda	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	675,000	
77	02.06.01.05.40	Alat Kantor	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	44,550,000	
78	02.07.01.02.100	Alat Studio	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	31,675,000	
79	02.06.01.05.40	Alat kantor	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	44,550,000	
80	02.07.01.02.100	Alat Studio	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	31,675,000	
81	02.06.02.03.01	Facum Cleaner	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,000,000	
82	02.06.02.01.10	Meja Segi Tiga	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5,000,000	
83	02.06.02.06.03	LCD 42 " Bidang Ekonomi	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	14,000,000	
84	02.06.02.06.03	LCD 42 " Bidang Sapra	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	14,000,000	
85	02.06.02.07.01	Racun Api	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,000,000	
86	02.06.01.05.10	Papan PP 30	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	500,000	
87	02.06.01.05.33	Noen Box	001-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,500,000	
88	02.06.01.05.14	Maket Kabupaten Solok	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9,500,000	
89	02.06.01.05.07	Papan 17 Pokok Pedoman Hidup	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	500,000	
90	02.06.02.06.23	Printer HP Laser jet 1020	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	10,000,000	
91	02.06.01.05.40	Tong Sampah Plastik	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	250,000	
92	02.06.01.05.10	Billboard Bidang Pendidikan	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	550,000	
93	02.06.01.05.10	Billboard Bidang Kesehatan	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	550,000	
94	02.06.01.05.10	Billboard Bidang Ekonomi	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	550,000	
95	02.06.02.06.29	Gambar Pejabat Lama Kab Solok	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	150,000	
96	02.06.01.05.40	Gantung Handuk	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	250,000	
97	02.06.01.05.07	Papan DUK PNS Bappeda	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,500,000	
98	02.06.02.01.01	Almari	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,150,000	
99	02.06.02.01.61	Marawa Umbul	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,465,000	

100	02.06.03.01.02	Komputer / PC	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9,346,000	
101	02.06.02.06.23	Printer	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,665,000	
102	02.06.02.06.18	UPS / Stabilizer	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	12,100,000	
103	02.06.03.02.03	Note Book	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	71,370,000	
104	02.06.03.05.10	Kelengkapan Komputer	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4,214,000	
105	02.06.04.03.08	Kursi Kerja	001-025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	10,425,000	
106	02.06.02.01.49	Sofa	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9,900,000	
107	02.06.02.01.02	Rak Buku / TU / Kembang	001-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4,985,000	
108	02.06.02.01.46	Karpet	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,500,000	
109	02.06.02.06.21	Camera Digital	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4,850,000	
110	02.06.03.05.10	Deskjet : Scanner, Printer, Copy, Faxmitle	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,414,000	
111	02.06.01.05.28	Layar Infocus	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,950,000	
112	02.06.02.01.30	Kursi Putar Sedang	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8,500,000	
113	02.06.02.01.28	Kursi Tantu	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9,875,000	
114	02.06.02.06.39	Dispenser / Termos Air	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6,250,000	
115	02.06.02.01.61	Gorden	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5,500,000	
116	02.06.02.05.28	Infokus	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	29,900,000	
117	02.06.03.02.02	Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	35,605,000	
118	02.06.02.06.23	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5,990,000	
119	02.06.03.05.10	Kelengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	41,605,000	
120	02.06.02.01.49	Sofa	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7,500,000	
121	02.06.01.01.02	Mesin TIK	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9,950,000	
122	02.06.02.01.01	Almari	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,150,000	
123	02.06.01.01.02	Mesin TIK	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,500,000	

124	02.06.02.06.49	Kelengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	200.448,839	
125	02.06.02.06.49	Handycam	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7.092,500	
126	02.06.02.01.27	Meja Rapat	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.995,000	
127	02.06.02.06.23	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9.755,000	
128	02.06.02.06.21	Camera Digital Sony W 290	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.175,625	
129	02.06.02.06.03	LCD Monitor Acer	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1.900,000	
130	02.06.03.02.02	Laptop	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	39.886,000	
131	02.07.01.02.100	Alat-alat Studio	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	29.260,000	
132	02.06.02.04.06	Printer HP C4 K 7000	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1.914,000	
133		Karpel Crown	025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.987,500	
134		Gorden	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.990,000	
135	02.06.02.06.49	Kelengkapan computer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8.484,432	
136	02.06.03.02.02	Laptop Acer	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	45.012,000	
137	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1.430,000	
138	02.06.02.04.06	Printer, Copy, Scan dan Fax	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	935,000	
139	02.06.02.04.06	Printer, Copy, Scan dan Injet Foto	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.972,000	
140	02.06.02.01.61	Gorden Ruang	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	23.468,500	
141	02.06.02.01.28	Kursi Rapat Office Chair Besar	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1.650,000	
142	02.06.02.01.28	Kursi Rapat Office Chair Sedang	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5.764,000	
143	02.06.02.01.28	Kursi Susun	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	12.529,000	
144	02.06.04.01.06	Meja Biro	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9.900,000	
145	02.06.02.01.28	Kursi Kerja	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2.000,000	
146	02.06.02.06.21	Camera Digital Sony DSC-W530	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2.600,000	
147	02.06.02.06.21	Camera Digital Sony DSC-W550	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2.700,000	

148	02.06.02.05.28	Infokus	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6,600,000	
149	02.06.02.01.28	Kursi Ruang Tunggu	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,500,000	
150	02.07.02.01.12	Telepon PABX	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6,000,000	
151	02.06.01.03.07	Mesin Foto Copy	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,950,000	
152	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,500,000	
153	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6,678,850	
154	02.06.03.02.02	Komputer / Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8,500,000	
155	02.06.02.06.49	Perlengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4,732,000	
156		Kipas Angin	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,475,000	
157		Kursi Rapat	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,750,000	
158		Tangga Aluminium	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,000,000	
159		Penunjuk Waktu (Jam Dinding)	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	950,000	
160		Bendera, Marawa dan Umbul	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6,500,000	
161	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8,000,000	
162	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7,247,500	
163	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	13,200,000	
164	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7,247,500	
165	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,500,000	
166	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3,451,250	
167	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,787,500	
168	02.06.02.01.30	Monitor/Display	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,485,000	
169	02.06.02.06.49	Perlengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	742,500	
170	02.06.02.06.49	Perlengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	12,776,020	
171	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,951,250	

172	02.06.02.04.06	Printer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3.800,000	
173	02.06.02.06.49	Perlengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2.497,440	
174	02.06.02.03.01	Vacuum Cleaner	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1.700,000	
175	02.06.02.01.01	Almari	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.000,000	
176		Piang dan Papan nama	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	48.721,000	
177	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	46.600,000	
178	02.06.02.04.06	Printer	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6.000,000	
179	02.06.02.04.06	Printer	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.540,000	
180	02.06.02.01.30	Monitor/Display	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3.500,000	
181	02.06.02.06.49	Perlengkapan Komputer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4.863,800	
182	02.06.02.01.28	Meja Kerja	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9.000,000	
183		Cofe Maker	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2.700,000	
184		Kursi kantor rendah	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	990,000	
185		Kursi Rapat	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	13,750,000	
186		Kursi Tunggu 4 dudukan	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6.930,000	
187		Kursi kantor tinggi	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,980,000	
188	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	24,860,000	
189	02.06.03.02.02	Komputer Note Book	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	19,800,000	
190		Mesin Polong rumpit	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1,740,000	
191		Komputer Notebook	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	24,805,000	
192		UPS / Stabilizer	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5,500,000	
193	02.06.03.02.02	Komputer Notebook	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	14,520,000	
194		Jaringan Internet	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2,500,000	

[illegible]

[illegible]

TUGAS PEMBANTUAN

Sumber Daya Manusia Pelaksana Tugas Pembantuan Pada Bappeda

No	Instansi pemberi Tugas Pembantuan	Gol	Klasifikasi				Jumlah
			S.2/S.3	S.1/D.IV	D.III/D.II/D.I	SD s/d SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dirjen Bina Pembangunan Daerah	IV	1	-	-	-	1
		III	-	6	-	-	6
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
	Jumlah						7

Sumber Daya Manusia Pelaksana Tugas Pembantuan Pada Bappeda

No	Jabatan	Eselonering	Nama Penjabat per 31 Desember 2014	Pangkat	Diklat	Ket
1	Kabid Ekonomi	III/b	Ahpi Gusta Tusri, S.STP	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
2	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Alam	IV/a	Erizal Syarbaini, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	Adum	
3	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV/a	Henike Sari, ST	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	
4	Perencana Pertama		Fathnaini Aisyah, SP	Penata Muda Tk. I (III/b)		
5	Fungsional Umum		Yudhi Syaifitra, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)		
6	Fungsional Umum		Osfa, AZ. SP	Penata Muda (III/a)		
7	Fungsional Umum		Eka Sari Putri Idayanti, SE	Penata Muda (III/a)		

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Dasar Hukum	Instansi pemberi Tugas Pembantuan	SKPD Pelaksana	Program Kegiatan dan pelaksanaan				Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan				Ouput	Permasaan	Solusi
				Program dan Kegiatan	Pelaksanaan			Sumber	Jumlah Anggaran	Realisasi keuangan	%			
1	2	3	4	5	Target	Realisasi	%	9	10	11	12	13	14	15
1	SP DIPA-010.06.4.080 448/2015	Dirjen Bina Pembangunan Daerah	Barenlitbang	Program Bina Pembangunan Daerah	7 Klp	7 Klp	100	APBN	442.067.000	438.798.870	99,67	Dokumen Wilayah	Terdapat sisa kontrak	-

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barenlitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

1. Perda Pelaksanaan

No.	Undang-undang/Permen/Perkaban dll	PERDA/PERBUP/ SK Bupati	Ket.
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 :	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 : Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.	
2.	Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.	Peraturan Bupati Solok Nomor 5 Tahun 2016 : Tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.	
3		Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2016 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.	
4		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-224-2016 : Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Forum Data Kabupaten Solok Tahun 2016.	
5		Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2016 : Tentang Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Solok.	
6		Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2016 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.	
7		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-112-2016 : Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.	
8		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-061-2016 : Tentang Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.	
9		Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2016 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.	
10		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-514-2016 : Tentang Tim Penyusunan Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.	
11		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-096-2016 : Tentang Penetapan Jorong Tertinggal dan Jorong Tertinggal di Kabupaten Solok.	
12		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-343-2016 : Pembentukan District Project Management Unit Program Nasional Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Solok Tahun 2016.	
13		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-091-2016 : Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.	
14		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-514-2016 : Tentang Pembentukan Penyusun Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Solok.	
15		Peraturan Bupati Solok Nomor : 4 Tahun 2016 : Tentang Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2015 Tentang	

		Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016.	
16		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-353-2016 : Tentang Pembentukan Tim Penyusun Identifikasi Nilai - Nilai Luhur Adat Basandi Sara' - Sara' Basandi Kitabullah Kabupaten Solok Tahun 2016.	
17		Keputusan Bupati Solok Nomor 910-297-2016 : Tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Solok Nomor 910-046-2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.	
18		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-100-2016 : Tentang Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III di Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.	
19		Keputusan Bupati Solok Nomor : 445-275-2016 : Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 445-225-2016 Tentang Pembentukan Tim Supervisor, Enumerator dan MONITORING Studi Environmental Healt Risk Assessment Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Solok.	
20		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-478-2016 : Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 050-209-2016 Tentang Penetapan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat Program Water resources And Irrigation Program di Kabupaten Solok Tahun 2016.	
21		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-502-2016 : Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Reguler Tahun 2016.	
22		Keputusan Bupati Solok Nomor 440-364-2016 : Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Terhadap Rencana Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Agropolitan Alahan Panjang di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.	
23		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-187-2016 : Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Solok Tahun 2017-2021.	
24		Keputusan Bupati Solok Nomor 445-225-2016 : Tentang Pembentukan Tim Supervisor, Enumerator dan Monitoring Studi Environmental Healt Risk Assessment Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Solok.	
25		Keputusan Bupati Solok Nomor 050-183-2016 : Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.	

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barentitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

2. Daftar Jabatan Yang ada

LAMPIRAN III.2 No. 4 (1)

No.	Jabatan Sesuai Dengan PP 41 Tahun 2007 dan Perda 6 s/d 10	Eselonering	Nama Penjabat per 31 Desember 2016	Pangkat	Diklat	Pendidikan Akhir
1.	Plt. Kepala Bappeda	III/a	IR. DESMALIA RAMADHANUR	Pembina (IV/b)	ADUM/ 1996	S1
2.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Sarana	III/b	DRS. ZAITUL IKHLAS	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. III	S1
3.	Plt. Kepala Bidang Tata Perencanaan Pembangunan Daerah	IV/a	NOVRIANDI PUTRA, SE. ME. AKT	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	S2
4.	Kepala Bidang Ekonomi	III/b	AHPI GUSTA TUSRI	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	S1
5.	Kasubag Perencanaan, Monev dan Pelaporan	IV/a	HANAFI, S.PD, M.PD	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	S2
6.	Kasubid Sosial Budaya	IV/a	ADRU, SH	Penata Tk. I (III/d)	Adum	S1
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	MAWARDI, SH, MM	Penata Tk. I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	S2
8.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Alam	IV/a	ERIZAL SYARBAINI, S.SOS	Penata Tk. I (III/d)	Adum	S1
9.	Kasubid Pemerintah	IV/a	WAWEN SATRIA, S.SOS, MM	Penata Tk. I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	S2
10.	Kasubag Keuangan	IV/a	CHARUL, SE	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	S1
11.	Kasubid Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha	IV/a	NOLLY EKA MARDIANTO, SE	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	S1
12.	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV/a	HENIKE SARI, ST	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	S1
13.	Plt. Kasubid Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika	III/c	HARIS KURNIAWAN, SE	Pembina (III/c)	-	S2

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barentlitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

3. Daftar Jabatan Fungsional Yang Ada

No.	Jabatan Fungsional Yang Ada	Ket
	FUNGSIONALPERENCANA	4 orang
1	Perencana Madya	REFLIDON,S.Pd.MIM (urusan wajib tata ruang)
2	Perencana Muda	RIA OKTORINA, SP, MSc (urusan wajib perencanaan pembangunan)
3	Perencana Muda	NAFRI,ST.MT.MSc (urusan wajib tata ruang)
4	Perencana Muda	FATHNAINI AISYAH, SP (urusan wajib perencanaan pembangunan)

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barentlitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

4. Jumlah PNS SKPD

No.	Jabatan	Esselonering	Nama Penjabat per 31 Desember 2016	Pangkat	Diklat	Pendidikan Terakhir
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1.	Plt. Kepala Bappeda	III/a	IR. DESMALLA RAMADHANUR	Pembina (IV/b)	ADUM/ 1996	S1
2.	Kepala Bidang Ekonomi	III/b	AHP GUSTA TUSRI	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	S1
3.	Kasubag Perencanaan, Monev dan Pelaporan	IV/a	HANAFL, S.PD, M.PD	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	S2
4.	Kasubid Sosial Budaya	IV/a	ADRUL, SH	Penata Tk.I (III/d)	Adum	S1
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	MAWARDI, SH, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	S2
6.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Alam	IV/a	ERIZAL SYARBAINI, S.SOS	Penata Tk.I (III/d)	Adum	S1
7.	Kasubid Pemerintah	IV/a	WAWEN SATRIA, S.SOS, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	S2
8.	Kasubag Keuangan	IV/a	CHAIRUL, SE	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	S1
9.	Kasubid Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha	IV/a	NOLLY EKA MARDIANTO, SE	Penata (III/c)	-	S1
10.	Fungsional Umum		DRS. EMIL DOUA KHAIRA, MM	Pembina Tk.I (IV/b)		S2
11.	Fungsional Umum		BENY GUSTRIA, SE. M.SI	Penata Tk.I (III/d)		S2
12.	Fungsional Umum		NOFRIZAL, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
13.	Fungsional Umum		YUDHI SYAIFITRA, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
14.	Fungsional Umum		ADEC EL KURNIAWAN.S.KOM	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
15.	Fungsional Umum		RIRI MAYLIZA, ST	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
16.	Fungsional Umum		HERIANTO,SE	Penata Muda (III/a)		S1
17.	Fungsional Umum		SUPRIATIN,S.SOS	Penata Muda (III/a)		S1
18.	Fungsional Umum		ERIVANTO, S.SOS	Penata Muda (III/a)		S1
19.	Fungsional Umum		OSFIA AZ, SP	Penata Muda (III/a)		S1
20.	Fungsional Umum		RINCE KUSMALA DEWI, SE	Penata Muda (II/a)		S1
21.	Fungsional Umum		YONDRIZO ZUSPA, SH	Penata Muda (III/a)		S1
22.	Fungsional Umum		EKA SARI PUTRI IDAYANTI, SE	Penata Muda (III/a)		S1
23.	Fungsional Umum		LASRI YANCE	Pengatur (II/c)		SMA
24.	Fungsional Umum		PERI SANJAYA	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		SMA
25.	Perencana Muda		RIA OKTORINA, SP, MSC	Penata Tk.I (III/d)		S2

26.	Perencana Pertama			FATHNAINI AISYAH,S.PT	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
	URUSAN WAJIB STATISTIK						
27.	Plt. Kabid Tata Perencanaan Pembangunan Daerah	IV/a		NOVRIANDI PUTRA, SE. ME. AKT	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	S2
28.	Fungsional Umum			HENDRAWATMAN,SE	Penata (III/c)		S1
29.	Fungsional Umum			ADRIAN PRASETIA ASMARAA, ST	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
30.	Fungsional Umum			DENI WAHYUNI, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
31.	Fungsional Umum			RASMADANIS, S.KOM	Penata Muda Tk.I (III/b)		S1
32.	Fungsional Umum			SYAHRIL,SE	Penata Muda (III/a)		S1
33.	Fungsional Umum			ELMAWATI, SP	Penata Muda (III/a)		S1
	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG						
34.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Sarana	III/b		DRS. ZAITUL IKHLAS	Pembina (IV/a)	-	S1
35.	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV/a		HENIKE SARI, ST	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	S1
36.	Plt. Kasubid Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika			HARIS KURNIAWAN, SE	Pembina (III/c)	-	S2
37.	Fungsional Umum			SAPARDI, SP	Penata Muda (III/a)		S1
38.	Fungsional Umum			ARIO VERNOSA	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		SMA
39.	Perencana Madya			REFLIDON,S.PD.MM	Pembina Tk. I (IV/b)	Diklat PIM Tk. III	S2
40.	Perencana Muda			NAFRI,ST.MT.MSC	Penata (III/c)		S2

Arosuka, Januari 2017
Kepala Bappeda Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

Jumlah Pejabat Yang Sudah Ikut Diklat Pim

No.	Jabatan	Esselonering	Nama Penjabat per 31 Desember 2016	Pangkat	Diklat	Ket
1.	Plt. Kepala Bappeda	III/a	IR. DESMALIA RAMADHANUR	Pembina (IV/b)	ADUM/ 1996	Seharusnya Diklat PIM Tk. III
2.	Kepala Bidang Ekonomi	III/b	AHPI GUSTA TUSRI	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	Seharusnya Diklat PIM Tk. III
3.	Kasubag Perencanaan, Monev dan Pelaporan	IV/a	HANAFL, S.PD, M.PD	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
4.	Kasubid Sosial Budaya	IV/a	ADRUL, SH	Penata Tk.I (III/d)	Adum	
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	MAWARDI, SH, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	
6.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Alam	IV/a	ERIZAL SYARBAINI, S.SOS	Penata Tk.I (III/d)	Adum	
7.	Kasubid Pemerintah	IV/a	WAWEN SATRIA, S.SOS, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	
8.	Kasubag Keuangan	IV/a	CHAIRUL, SE	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	
10.	Plt. Kabid Tata Perencanaan Pembangunan Daerah	IV/a	NOVRIANDI PUTRA, SE. ME. AKT	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
12.	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV/a	HENIKE SARI, ST	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	

Arosuka, Januari 2017
Kepala Bappeda Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

Daftar Jumlah Pejabat SKPD

No.	Jabatan	Esselonering	Nama Pejabat per 31 Desember 2016	Pangkat	Diklat	Ket
1.	Plt. Kepala Bappeda	III/a	IR. DESMALIA RAMADHANUR	Pembina (IV/b)	ADUM/ 1996	
2.	Kepala Bidang Ekonomi	III/b	AHPI GUSTA TUSRI	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
3.	Kasubag. Perencanaan, Monev dan Pelaporan	IV/a	HANAFL, S.PD, M.PD	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
4.	Kasubid Sosial Budaya	IV/a	ADRUL, SH	Penata Tk.I (III/d)	Adum	
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	MAWARDI, SH, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	
6.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Alam	IV/a	ERIZAL SYARBAINI, S.SOS	Penata Tk.I (III/d)	Adum	
7.	Kasubid Pemerintah	IV/a	WAWEN SATRIA, S.SOS, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	
8.	Kasubag Keuangan	IV/a	CHAIRUL, SE	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	
9.	Kasubid Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha	IV/a	NOLLY EKA MARDIANTO, SE	Penata (III/c)	-	
10.	Plt. Kabid Tata Perencanaan Pembangunan Daerah	IV/a	NOVRIANDI PUTRA, SE. ME. AKT	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
11.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Sarana	III/b	DRS. ZAITUL IKHLAS	Pembina (IV/a)	-	
12.	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV/a	HENIKE SARI, ST	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	
13.	Plt. Kasubid Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika		HARIS KURNIAWAN, SE	Pembina (III/c)	-	

Arosuka, Januari 2017
Kepala Bappeda Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

Daftar Jumlah Pejabat SKPD Yang ada dan Telah Memenuhi Persyaratan Diklat PIM

No.	Jabatan	Eselonering	Nama Penjabat per 31 Desember 2016	Pangkat	Diklat	Diklat Yang Bisa Dilikuti
1.	Plt. Kepala Bappeda	III/a	IR. DESMALLIA RAMADHANUR	Pembina (IV/b)	ADUM/ 1996	Diklat PIM Tk. III
2.	Kepala Bidang Ekonomi	III/b	AHPI GUSTA TUSRI	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	Diklat PIM Tk. III
3.	Kasubag Perencanaan, Monev dan Pelaporan	IV/a	HANAFL, S.PD, M.PD	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
4.	Kasubid Sosial Budaya	IV/a	ADRUL, SH	Penata Tk.I (III/d)	Adum	
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	MAWARDI, SH, MM	Penata Tk.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	
6.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Alam	IV/a	ERIZAL SYARBAINI, S.SOS	Penata TK.I (III/d)	Adum	
7.	Kasubid Pemerintah	IV/a	WAWEN SATRIA, S.SOS, MM	Penata TK.I (III/d)	Diklat PIM Tk. IV	
8.	Kasubag Keuangan	IV/a	CHAIRUL, SE	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	
9.	Kasubid Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha	IV/a	NOLLY EKA MARDIANTO, SE	Penata (III/c)	-	Diklat PIM Tk. IV
10.	Plt. Kabid Tata Perencanaan Pembangunan Daerah	IV/a	NOVRIANDI PUTRA, SE. ME. AKT	Pembina (IV/a)	Diklat PIM Tk. IV	
11.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Sarana	III/b	DRS. ZAITUL IKHLAS	Pembina (IV/a)	-	Diklat PIM Tk. IV dan Diklat PIM Tk. III
12.	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	IV/a	HENIKE SARI, ST	Penata (III/c)	Diklat PIM Tk. IV	
13.	Plt. Kasubid Transportasi, Sumber Daya Air dan Informatika		HARIS KURNIAWAN, SE	Pembina (III/c)	-	

Arosuka, Januari 2017
Kepala Bappeda Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 005

1. Jumlah PNS Bappeda Kab Solok

Jumlah PNS Bappeda / Jumlah PNS Kabupaten Solok
40 orang / 5.977 orang = 0,0067 x100 % = 0,67 %

2. Program yang ada di RKPD, Renja, RKA, dan DPA

No.	Program RKPD	Program Renja	Program RKA	Program DPA	Ket.
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terakomodir
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan Prasarana Aparatur. 2. Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	Terakomodir
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terakomodir
04	Program Peningkatan Peng. Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan	Program Peningkatan Peng. Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Peng. Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Peng. Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terakomodir
05	Program pengembangan data/informasi	Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tidak Terakomodir
06	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terakomodir
07	Program Kerjasama	Program Kerja Sama Pembangunan	Program Kerja Sama Pembangunan	Program Kerja Sama Pembangunan	Terakomodir

	Daerah	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terakomodir
08	Program peningkatan fasilitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Program peningkatan fasilitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1. Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana 2. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3. Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	Program peningkatan fasilitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1. Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana 2. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3. Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	Program peningkatan fasilitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1. Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana 2. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3. Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	Tidak Terakomodir Terakomodir Terakomodir
09	Program Perencanaan Pembangunan Daerah :	Program Perencanaan Pembangunan Daerah : 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Penyusunan rancangan RPJMD 3 Penyusunan Rancangan RKPD 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6 Sistem Informasi Kekerabatan Minang Kabau	Program Perencanaan Pembangunan Daerah : 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Penyusunan rancangan RPJMD 3 Penyusunan Rancangan RKPD 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6 Sistem Informasi Kekerabatan Minang Kabau	Program Perencanaan Pembangunan Daerah : 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Penyusunan rancangan RPJMD 3 Penyusunan Rancangan RKPD 4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6 Sistem Informasi Kekerabatan Minang Kabau	Terakomodir Terakomodir Terakomodir Terakomodir
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terakomodir
11	Program Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan	Terakomodir

	Pembangunan Sosial Budaya	Sosial Budaya Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya	Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya	Sosial Budaya Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya	Terakomodir
12	Program Pengembangan data/informasi /statistik daerah	Program Pengembangan data/informasi /statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Program Pengembangan data/informasi /statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Program Pengembangan data/informasi /statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Terakomodir

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barenlitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 00

Realisasi Anggaran

No.	Total Anggaran SKPD (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Persentase
1	9.303.090.697,-	1.354.766.412.095,11,-	0,69

No.	Belanja Modal SKPD (Rp)	Total Belanja SKPD (Rp)	Persentase
1	568.037.000,-	5.962.300.065,-	9,53

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barentitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19590703 198603 1 00

No.	Belanja Pemeliharaan SKPD (Rp)	Belanja Barang dan Jasa SKPD (Rp)	Persentase
1	94.120.000,-	4.682.681.065,-	2,01

No.	Belanja Pemeliharaan SKPD (Rp)	Total Belanja SKPD (Rp)	Persentase
1	94.120.000,-	5.962.300.065,-	1,58

No.	Belanja Modal SKPD (Rp)	Total Belanja SKPD (Rp)	Persentase
1	568.037.000,-	5.962.300.065,-	9,53
No.	Total Anggaran SKPD (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Persentase
1	- Belanja Tidak Langsung = Rp. 3.340.790.632 - Belanja langsung = Rp. 5.962.300.065 Total anggaran = Rp. 9.303.090.697		

--	--	--

3. Belanja Modal

No.	Belanja Modal	Anggaran	Total Belanja	Persentase	KETERANGAN
1	Belanja modal pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	300,000,000	289,120,000	96.37%	
2	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	4,000,000	4,000,000	100.00%	
3	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4,500,000	4,500,000	100.00%	
4	Belanja modal pengadaan Alat Pembersih	6,000,000	6,000,000	100.00%	
5	Belanja modal pengadaan Kelengkapan Rumah Tangga	115,000,000	113,300,000	98.52%	
6	Belanja modal pengadaan Komputer Unit/Jaringan	12,485,000	12,485,000	100.00%	
7	Belanja modal pengadaan Notebook/Laptop	31,141,000	31,141,000	100.00%	
8	Belanja modal pengadaan Kelengkapan Peralatan Komputer	5,500,000	5,300,000	96.36%	
9	Belanja modal Pengadaan meja rapat	22,196,000	22,110,000	99.61%	
10	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10,000,000	9,900,000	99.00%	
11	Belanja modal pengadaan Kursi Kerja	7,500,000	7,260,000	96.80%	
12	Belanja modal pengadaan Peralatan Studio Visual	35,000,000	33,198,000	94.85%	
13	Belanja modal pengadaan Bendera/Merawa/Umbul-umbul dan sejenisnya	14,715,000	14,715,000	100.00%	
TOTAL		568,037,000	553,029,000	97.36%	

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barenlitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19670421199003 1 005

4. Belanja Barang dan Jasa

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Total Belanja	Persentase	KETERANGAN
1	Belanja Alat Tulis Kantor	312,951,042	309,806,950	99.00%	
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9,381,500	9,380,800	99.99%	

3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	7,140,000	7,125,000	99.79%	
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11,445,800	11,404,200	99.64%	
5	Belanja bahan bakar minyak/gas	339,152,350	327,589,675	96.57%	
6	Belanja Media Penyimpan Data (Flash disk, CD)	6,700,000	6,116,000	91.28%	
7	Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan (Keyboard, Mouse)	3,700,000	3,695,000	99.86%	
8	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,000,000	7,000,000	100.00%	
9	Belanja bahan praktek/peraga	9,750,000	9,750,000	100.00%	
10	Belanja Telepon	2,100,000	1,744,001	83.05%	
11	Belanja Air	8,000,000	5,948,100	71.35%	
12	Belanja Listrik	18,000,000	18,000,000	100.00%	
13	Belanja Kawat/Faxsimile/Internet	21,300,000	21,300,000	100.00%	
14	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	900,000	875,932	97.33%	
15	Belanja Pajak kendaraan bermotor	3,000,000	2,179,950	72.67%	
16	Belanja penggantian suku cadang dan service	66,000,000	64,770,000	98.14%	
17	Belanja Cetak	210,570,000	204,691,000	97.21%	
18	Belanja Penggandaan	248,826,700	239,633,800	96.31%	
19	Belanja Makan dan Minuman Rapat	256,915,500	248,069,400	96.56%	
20	Belanja Makan dan Minum Rapat Tamu	16,000,000	15,977,500	99.86%	
21	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	7,500,000	100.00%	
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,061,840,473	1,055,358,600	99.39%	
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	596,227,700	565,782,226	94.89%	
24	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	2,000,000	2,000,000	100.00%	
25	Belanja Pemeliharaan Komputer	17,500,000	17,250,000	98.57%	
26	Belanja Pemeliharaan Mebel/Furniture	2,620,000	2,550,000	97.33%	
27	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	2,800,000	93.33%	
28	Belanja jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	99,195,000	99.20%	
29	Belanja jasa Konsultansi Perencanaan	170,000,000	163,045,300	95.91%	
30	Belanja jasa Tenaga Kerja Non PNS	100,000,000	99,809,000	99.81%	
31	Honorium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56,300,000	56,300,000	100.00%	
32	Belanja Dekorasi	9,000,000	9,000,000	100.00%	
33	Belanja Penggantian transport dan akomodasi	150,500,000	148,300,000	98.54%	
34	Belanja Dokumentasi	1,700,000	1,700,000	100.00%	

35	Belanja Akomodasi rapat/ pertemuan/ pelaksanaan kegiatan diluar kantor	422,500,000	421,500,000	99.76%	
36	Belanja Jasa Pembuatan / Pengembangan Website	4,500,000	4,500,000	100.00%	
37	Belanja Jasa Kerjasama dengan Universitas/Perguruan Tinggi	383,000,000	383,000,000	100.00%	
38	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Budaya, Kesenian, Olahraga dan Sejenisnya)	34,760,000	34,760,000	100.00%	
39	Belanja Retribusi Sampah	900,000	900,000	100.00%	
TOTAL		4,682,681,065	4,590,329,934	98.03%	

Belanja Pemeliharaan					
No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi	Persentase	KETERANGAN
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	2,000,000	2,000,000	100.00%	
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	
3	Belanja Pemeliharaan Komputer	17,500,000	17,250,000	98.57%	
4	Belanja Pemeliharaan Mebel/Furniture	2,620,000	2,550,000	97.33%	
5	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	2,800,000	93.33%	
TOTAL		25,120,000	24,600,000	97.93%	

Arosuka, Januari 2017
Kepala Barenitbang Kab. Solok

H. DUSRAL, SE. MM
NIP 19670421199003 1 005

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (PAGU)	REALISASI	SISA
	1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
25	Pelayanan Administrasi Perkantoran	402,976,050	394,785,533.	8,190,517
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
45	Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Aparatur	244,425,800	240,627,997.	3,797,803
47	Pengadaan Sarana dan Prasaran Aparatur	568,037,000	553,029,000.	15,008,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	13,023,700	12,684,900.	338,800
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
09	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,750,000	17,741,550.	8,450
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	151,000,000	1446,328,150	4,671,850
16	Program Kerjasama Pembangunan			
04	Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	955,300,000	944,255,408	11,044,592
20	Program Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			

	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	-	-	-
	02	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	58,000,000	57,927,950	72,050
	03	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	127,266,115	127,207,250	58,865
15		Program Pengembangan data/informasi			
	02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	645,903,400	632,787,300.	13,116,100
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	94,282,550	94,282,550	-
	05	Penyusunan Rancangan RPJMD	366,162,800	365,162,800	1,000,000
	08	Penyusunan Rancangan RKPD	650,769,650	636,262,948	14,506,702
	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	133,577,200	133,577,200	-
	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	87,000000	86,151,350	848,650
	14	Sistem Informasi Keakerabatan Minang Kabau	-	-	-
22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
	01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	395,750,000	387,213,400	8,536,600
	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	540,050,000	539,679,200	370,800
23		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya			
	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	926,929,200	908,302,749	18,626,451

15		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah			
	01	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	230,000,000	211,565,699	18,434,301
		JUMLAH	5,962,300,065	5,856,785,634	105,514,634

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN SOLOK

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Dokumen Pendukung/Kertas Kerja	Sumber Data
1	Keberadaan PERDA RTRW	Ada	Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Solok Tahun 2012 - 2031	Ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan dalam yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb	Barenlitbang
2	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program. - Prioritas pembangunan nasional ada, Sebanyak 11 program prioritas.	80 %	FC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2016 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional	Barenlitbang
3	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.	100 %	Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah	
4	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada	1. website	Ada	Print Out Halaman depan Web	SKPD Pengelola WEB
			2. Leaflet/Brosur	tidak	Fotocopy Leaflet/Brosur	
			3. Radio	tidak	Fotocopy surat izin penyiaran	
			4. Dan lain-lain	tidak		

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : Solok
NAMA SKPD : Bappeda
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

- 1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
- 2. Urusan Wajib Statistik
- 3. Urusan Wajib Penataan Ruang

NO	I K K	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			Dokumen Pendukung/Kert s Kerja
			Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Urusan Wajib Statistik	Urusan Wajib Penataan Ruang	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Urusan Wajib Statistik	Urusan Wajib Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4 A)	(4 B)	(4 C)	(5 A)	(5 B)	(5 C)	(6)
1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program. - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program	- Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program. - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program. - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program	-	100 %	100 %	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada /tidak ada SOP	1. SOP Barang pakai habis 2. SOP Penyusunan data perencanaan 3. SOP Mengikuti diklat fungsional perencanaan 4. SOP pengisian SKP 5. SOP Pengangkatan fungsionalperencana 6. SOP Penerbitan izin belajar pegawai 7. SOP Kenaikan gaji berkala 8. SOP Penyusunan KUA/PPAS perubahan 9. SOP Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 10. SOP Pelaporan dana TP UB 11. SOP Penyusunan laporan fisik dan keuangan 12. SOP Pelaksanaan musrenbang 13. SOP Pengajuan kenaikan pangkat 14. SOP Pencairan gaji 15. SOP Pencairan tunjangan daerah 16. SOP Pencairan uang persediaan 17. SOP Penetapan lokasi program Pamsimas 18. SOP Pengadaan langsung 19. SOP pengajuan cuti 20. SOP Pengajuan proposal Bansos 21. SOP Pengurusan Karis dan Karsu 22. SOP Pengajuan pensiun 23. SOP Penyusunan DUK dan Bezzetting 24. SOP Penyusunan kajian bidang ekonomi 25. SOP Penyusunan kajian 26. SOP Penyusunan KUA/PPAS 27. SOP Perjalanan dinas dalam daerah 28. SOP Perjalanan dinas luar daerah 29. SOP Penyusunan jadwal kegiatan 30. SOP Pelaksanaan rapat koordinasi bidang SDP 31. SOP Rapat koordinasi	SOP Penyusunan rencana aksi	1. SOP Penerbitan izin pemanfaatan ruang 2. SOP Pembentukan tim teknis RDTR	Ada 37 SOP	Ada 1 SOP	Ada 2 SOP	Daftar rincian SOP yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang

NO	I K K	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			Dokumen Pendukung/Kertas Kerja
			Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Urusan Wajib Statistik	Urusan Wajib Penataan Ruang	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Urusan Wajib Statistik	Urusan Wajib Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4 A)	(4 B)	(4 C)	(5 A)	(5 B)	(5 C)	(6)
			32. SOP Pelaksanaan rapat staf 33. SOP Penyusunan Renja 34. SOP Surat keputusan kepala Bappeda 35. SOP Pengajuan SPP-GU 36. SOP Surat Masuk 37. SOP Surat keluar						
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada sebanyak 3 - Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, sebanyak 40	- Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada sebanyak 12 - Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, sebanyak 40	- Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada sebanyak 10 - Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, sebanyak 40	7,5 %	30 %	25 %	1. Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani perda pelaksanaan dari permen tsb 2. Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani
4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 11	- Jabatan yang ada sebanyak 1 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	81,82 %	33,33 %	100,00 %	1. Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi 2. FC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD
5	Keberadaan fungsional	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional Perencana muda 2. Jabatan Fungsional Perencana Pertama	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD -	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional Perencana madya 2. Jabatan Fungsional Perencana Muda	Ada	tidak ada	Ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait
6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- Jumlah PNS SKPD, sebanyak 26 personil	- Jumlah PNS SKPD , sebanyak 7 personil	- Jumlah PNS SKPD , sebanyak 7 personil	0,44 %	0,12 %	0,12 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD pada bidang terkait
			- Total PNS Kabupaten, sebanyak 5.977 personil	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 5.977 personil	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 5.977 personil				Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Kab/Kota
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang Memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan, sebanyak 4 org.	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan, sebanyak 0 org.	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan, sebanyak 1 org.	36,36 %	0 %	33,33 %	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim
			- Jumlah Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	- Jumlah Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	- Jumlah Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.				Daftar jumlah pejabat SKPD
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 11 org.	Jumlah Pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 3 org.	Jumlah Pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 3 org.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim
			Jumlah pejabat SKPD yang ada, sebanyak 11 jbt	Jumlah pejabat SKPD yang ada, sebanyak 3 jbt	Jumlah pejabat SKPD yang ada, sebanyak 3 jbt				Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan yang ada -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan yang ada -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD.	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	FC halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya dokumen perencanaan tsb
10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	FC halaman muka (cover), halam yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait
			Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD, sebanyak 10	Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD, sebanyak 1	Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD, sebanyak 1				FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait

NO	I K K	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			Dokumen Pendukung/Kertas Kerja
			Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	Urusan Wajib Statistik	Urusan Wajib Penataan Ruang	Urusan Wajib Perencanaan	Urusan Wajib Statistik	Urusan Wajib Penataan	
(1)	(2)	(3)	(4 A)	(4 B)	(4 C)	(5 A)	(5 B)	(5 C)	(6)
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA
			Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.				FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RK
12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	90,00 %	100,00 %	100,00 %	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA
			Jumlah program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program	Jumlah program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program	Jumlah program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program				FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DP
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.9.303.090.697 - Total Belanja APBD (anggaran), sebesar Rp- 1.354.766.412.095,11	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.230.000.000 - Total Belanja APBD (anggaran), sebesar Rp- 1.354.766.412.095,11	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.151.000.000 - Total Belanja APBD (anggaran), sebesar Rp- 1.354.766.412.095,11	95,90 %	2,47 %	1,62 %	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.568.037.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.5.962.300.065	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.5.962.300.065	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.5.962.300.065	9,53 %	0 %	0 %	FC Laporan Keuangan SKPD
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.81.750.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.682.681.065	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.8.378.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.682.681.065	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.3.992.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.682.681.065	1,75 %	0,18 %	0,09 %	FC Laporan Keuangan SKPD
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.81.750.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.5.962.300.065	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.8.378.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.5.962.300.065	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.3.992.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.5.962.300.065	1,37 %	0,14 %	0,07 %	FC Laporan Keuangan SKPD
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calc)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calc)	Jumlah komponen laporan keuangan sebanyak 3 jenis, sbb: - Neraca - LRA - CALK	Jumlah komponen laporan keuangan sebanyak 3 jenis, sbb: - Neraca - LRA - CALK	Jumlah komponen laporan keuangan sebanyak 3 jenis, sbb: - Neraca - LRA - CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan laporan keuangan tsb (Neraca, LRA, CaLK)
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	Ada	Ada	Ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi
19	Jumlah nilai aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai aset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah nilai aset yang tidak digunakan SKPD sebanyak Rp.851.808.660 Total nilai Aset yang ikuasai SKPD, sebanyak Rp.4.020.697.406	Jumlah nilai aset yang tidak digunakan SKPD sebanyak Rp.851.808.660 Total nilai Aset yang ikuasai SKPD, sebanyak Rp.4.020.697.406	Jumlah nilai aset yang tidak digunakan SKPD sebanyak Rp.851.808.660 Total nilai Aset yang ikuasai SKPD, sebanyak Rp.4.020.697.406	21 %	0%	0%	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan
20	Jumlah/fasilitas prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi				
	Papan Pengumuman		Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 jenis.	-	-	Foto Bukti Fisik
	Website		Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 jenis.	-	-	Print out foto
21	Keberadaan	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	tidak ada	tidak ada	tidak ada	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN: SOLOK

NO (1)	URUSAN (2)	NO. (3)	IKK (4)	RUMUS/PERSAMAAN (5)	CAPAIAN KINERJA (6)	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA (7)	SUMBER DATA (7)
5	Tata Ruang	31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100 \%$	$\frac{121 \text{ Ha}}{12.908} \times 100 \% = 0,94 \%$	- FC Daftar Luas ruang terbuka hijau milik Pemda - FC Daftar Luas wilayah ber HPL/HGB	Dinas PU & Bappeda
6	Perencanaan Pembangunan	32	Tersedianya dokumen perencanaan RP/PPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada	FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman diantatangannya RP/PPD	Bappeda
		33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RP/IMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman diantatangannya RP/IMD	Bappeda
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada	FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman diantatangannya RKPD	Bappeda
		35	Penjabaran Program RP/IMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan $\frac{\text{Jumlah program RP/IMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}} \times 100 \%$	$\frac{128}{128} \times 100 \% = 100$	- FC halaman muka (cover), dan halaman yang menunjukkan program RKPD tahun berkenaan dengan diantatangani pejabat yang berwenang - FC halaman muka (cover), dan - FC Daftar rincian jumlah rumah tangga pengguna air bersih - FC Daftar rincian jumlah rumah tangga per kecamatan	Bappeda
7	Perumahan	36	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih $\frac{\text{Jumlah rumah tangga}}{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}} \times 100 \%$	$\frac{53.328}{76.729} \times 100 \% = 69,50 \%$	- FC Daftar rincian Luas lingkungan pemukiman kumuh - FC Daftar rincian luas wilayah	Dinas PU & Bappeda
		37	Lingkungan permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	$\frac{474}{373.800} \times 100 \% = 0,13 \%$	- FC Daftar jumlah rumah layak huni - FC Daftar rincian jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs (minimal per kecamatan)	Dinas PU & Bappeda
		38	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100 \%$	$\frac{66.256}{78.977} \times 100 \% = 83,89 \%$		
24	Statistik	74	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		buku Kab/kota dalam angka dan FC halaman depan (cover), dalam pertama dan halaman yang menunjukkan diantatangannya buku tsb (tahun 2016 yang sudah terbit)	Bappeda

		75	Buku "PDRB kabupaten"	Ada		buku PDRB Kab/Kota dan FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman yang menunjukkan di tandatanganinya buku tsb (tahun 2016 yang sudah terbit)	Bappeda
--	--	----	-----------------------	-----	--	--	---------